



**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2010**

**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, 2011**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2010 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**.

Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh ANRI pada Tahun 2010 serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi ANRI dengan mengacu kepada Peraturan Kepala ANRI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014.

Diharapkan LAKIP ANRI ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja ANRI dan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa datang.

Jakarta, Maret 2011
Kepala,

M. Asichin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi	1
1.3 Maksud dan Tujuan LAKIP	6
1.4 Sistematika Penyajian	6
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis	9
2.2 Indikator Kinerja Utama	14
2.3 Penetapan Kinerja	15
BAB III CAPAIAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama ANRI	19
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	21
3.3 Capaian Sasaran Penunjang	73
3.4 Akuntabilitas Keuangan	81
BAB IV PENUTUP	87
Lampiran	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: RENCANA CAPAIAN SASARAN ANRI	16
Tabel 2	: JUMLAH INSTANSI PUSAT DAN DAERAH YANG TELAH MELAKUKAN PENGELOLAAN ARSIP SESUAI DENGAN KAIDAH KEARSIPAN DARI TAHUN 2009 S.D 2010	19
Tabel 3	: JUMLAH KHASANAH ARSIP YANG TERSIMPAN DI ANRI	20
Tabel 4	: PERBANDINGAN RESTORASI ARSIP FILM/VIDEO DAN ARSIP KONVENSIONAL	20
Tabel 5	: PERBANDINGAN JUMLAH ARSIP YANG DIALIHMEDESIKAN TAHUN TAHUN 2009 DAN TAHUN 2010	20
Tabel 6	: PERBANDINGAN JUMLAH PENGUNJUNG TAHUN 2009 DAN 2010	21
Tabel 7	: JUMLAH BASIS DATA ARSIP PILKADA PADA JIKN TAHUN 2010	40
Tabel 8	: PERBANDINGAN JUMLAH KELUHAN PENGGUNA JIKN TAHUN 2009 DAN TAHUN 2010	43
Tabel 9	: PERBANDINGAN JUMLAH INVENTARIS KHAZANAH INFORMASI ARSIP STATIS MELALUI PORTAL JIKN TAHUN 2009 S.D 2010	43
Tabel 10	: DISEMINASI INFORMASI MELALUI INTERNET YANG DISESUAIKAN DENGAN TEMA TAHUN 2010	45
Tabel 11	: PERBANDINGAN JUMLAH ANGGOTA JIKN TAHUN 2009 DAN 2010	47
Tabel 12	: JUMLAH INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH YANG DIBINA OLEH ANRI TAHUN 2009 DAN 2010	54
Tabel 13	: JUMLAH INSTANSI PUSAT DAN DAERAH YANG TELAH MELAKUKAN PENGELOLAAN ARSIP SESUAI DENGAN KAIDAH KEARSIPAN TAHUN 2009 S.D 2010	55
Tabel 14	: JUMLAH INSTANSI YANG DIBERIKAN BIMBINGAN DAN KONSULTASI PENYUSUNAN JRA TAHUN 2010	56
Tabel 15	: JUMLAH INSTANSI YANG MENDAPAT PERSETUJUAN JADWAL RETENSI ARSIP TAHUN 2010	58
Tabel 16	: PERBANDINGAN JUMLAH USULAN JRA INSTANSI DAN JUMLAH INSTANSI YANG DISETUJUI TAHUN 2009 DAN TAHUN 2010.....	59

Tabel 17 : PERBANDINGAN JUMLAH INSTANSI YANG MENYERAHKAN ARSIP STATIS KE ANRI	65
Tabel 18 : PERBANDINGAN JUMLAH INSTANSI YANG MEMUSNAHKAN ARSIP TAHUN 2009 DAN 2010	65
Tabel 19 : PERKEMBANGAN JUMLAH DAFTAR ARSIP/INVENTARIS YANG DIMILIKI ANRI SAMPAI DENGAN TAHUN 2010	67
Tabel 20 : JUMLAH KHASANAH ARSIP YANG TERSIMPAN DI ANRI	67
Tabel 21 : PERBANDINGAN RESTORASI ARSIP FILM/VIDEO DAN ARSIP KONVENSIONAL TAHUN 2009 DAN 2010	68
Tabel 22 : PERBANDINGAN JUMLAH ARSIP YANG DIALIHMEDESIKAN TAHUN 2009 DAN TAHUN 2010	69
Tabel 23 : PERBANDINGAN JUMLAH PENGUNJUNG TAHUN 2009 DAN 2010	70
Tabel 24 : PERBANDINGAN JUMLAH ARSIP TEKSTUAL YANG DIMANFAATKAN OLEH PENGGUNA TAHUN 2009 DAN 2010	70
Tabel 25 : PERBANDINGAN JUMLAH ARSIP FORMAT KHUSUS YANG DIMANFAATKAN OLEH PENGGUNA TAHUN 2009 DAN 2010	71
Tabel 26 : JUMLAH KUNJUNGAN DIORAMA SEJARAH PERJALANAN BANGSA TAHUN 2010	79
Tabel 27 : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ANRI	81
Tabel 28 : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ANRI BERDASARKAN PROGRAM TAHUN 2010	82
Tabel 29 : REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN BERDASARKAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2010	83

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan keniscayaan yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2010 ini disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang **Percepatan Pemberantasan Korupsi** dalam rangka memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LAKIP sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP adalah sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan kepada publik, yang merupakan sarana evaluasi atas capaian kinerja ANRI dalam melaksanakan visi dan misinya, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

LAKIP ini menyajikan capaian kinerja ANRI selama tahun 2010. Berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, capaian kinerja tahun 2010 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan ANRI dalam tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kearsipan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Sistem AKIP merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi. Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena itu setiap lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam LAKIP.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah lembaga kearsipan nasional, berkewajiban melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, ANRI bertugas untuk melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi. Di samping itu, untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional, ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional

mempunyai kewajiban untuk melakukan penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan.

Dalam hal ini pula, ANRI melaksanakan pembinaan dan pengembangan arsiparis melalui upaya pengadaan arsiparis, pengembangan kompetensi dan keprofesionalan arsiparis melalui penyelenggaraan, pengaturan, serta pengawasan pendidikan dan pelatihan kearsipan, pengaturan peran dan kedudukan hukum arsiparis dan penyediaan jaminan kesehatan dan tunjangan profesi untuk sumber daya kearsipan.

ANRI merupakan Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Hal ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, sebagaimana yang telah diubah terakhir perubahan dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas ANRI mempunyai fungsi :

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga;
3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan;
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas ANRI mempunyai peranan:

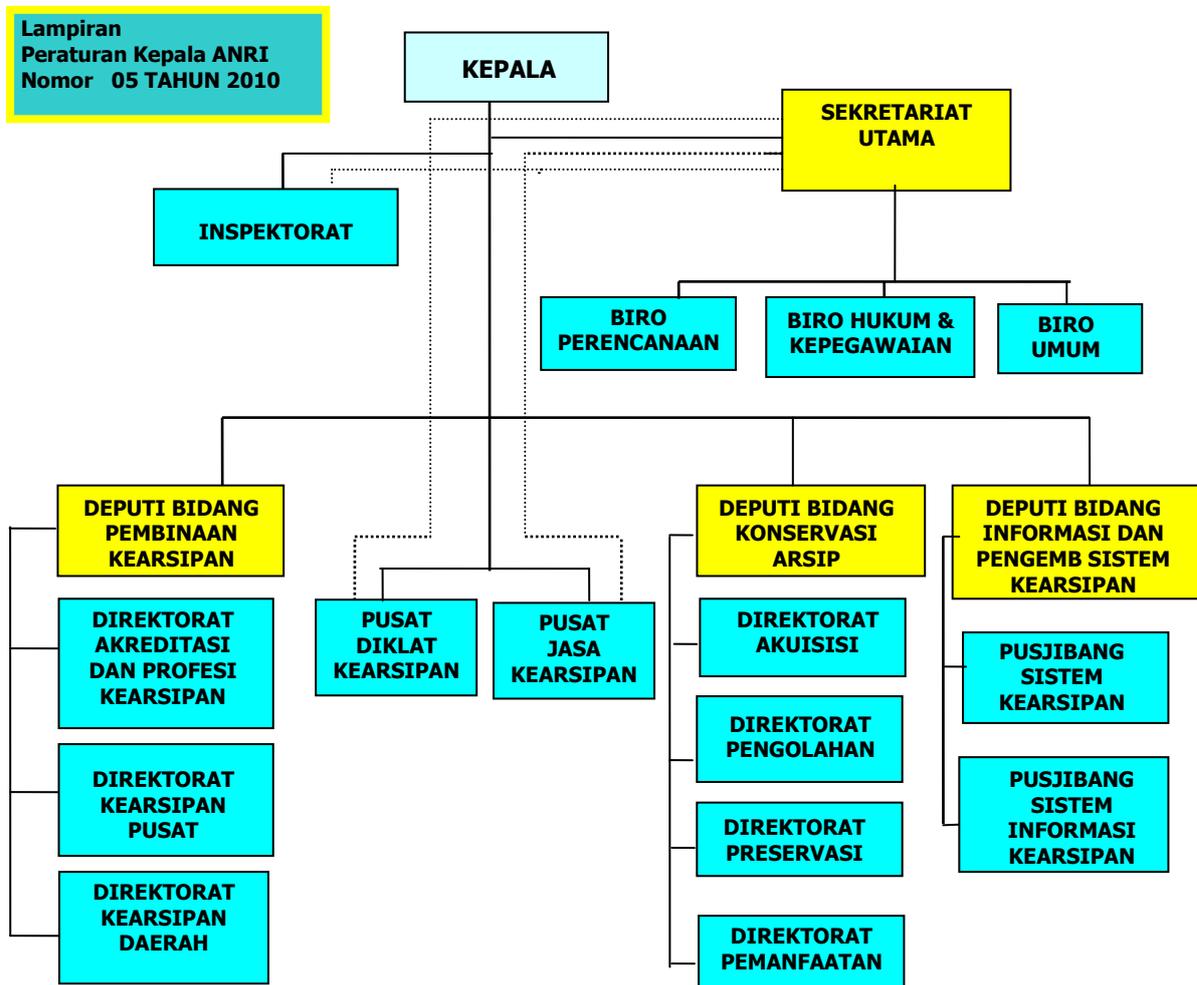
1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kearsipan;

2. Penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidang kearsipan;
4. Peranan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kearsipan;
 - b. penyelamatan serta pelestarian arsip dan pemanfaatan naskah sumber arsip;

Dalam era globalisasi ini, peranan dan fungsi ANRI sangat dibutuhkan keberadaannya, baik oleh pemerintah, swasta, peneliti maupun masyarakat. Peranan dan fungsi ANRI tersebut sangat erat kaitannya dengan perkembangan yang terjadi dalam dunia kearsipan yang berkembang pesat saat ini, terutama yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang aktual dewasa ini antara lain :

1. Pemilihan Umum, baik legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden;
2. Pemilihan Kepala Daerah, baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati maupun Walikota dan Wakil Walikota;
3. Masalah-masalah perbatasan, baik antara negara, provinsi maupun kabupaten/kota di laut maupun di darat;
4. Masalah kedudukan pulau-pulau terluar Indonesia;
5. Penyelamatan dan pelestarian arsip Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Program Layanan Masyarakat Sadar Arsip;
7. Program Arsip Masuk Desa;
8. Penyusunan peraturan pelaksanaan dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Pelindungan, Pengamanan, dan Penyelamatan arsip dari bencana.

Struktur organisasi ANRI dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dibantu oleh Sekretariat Utama dan 3 (tiga) Deputi, yaitu Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan; Deputi Bidang Konservasi Arsip; dan Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan.

Pelaksanaan tugas ANRI dilaksanakan oleh satuan-satuan organisasi tersebut di atas, yaitu:

1. Sekretariat Utama, melaksanakan tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan ANRI.

Sekretariat Utama terdiri dari:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Hukum dan Kepegawaian;
- c. Biro Umum.

2. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan kearsipan nasional.

Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan terdiri dari:

- a. Direktorat Akreditasi dan Profesi Kearsipan;
- b. Direktorat Kearsipan Pusat;
- c. Direktorat Kearsipan Daerah.

3. Deputi Bidang Konservasi Arsip, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di bidang konservasi arsip secara nasional.

Deputi Bidang Konservasi Arsip terdiri dari:

- a. Direktorat Akuisisi;
- b. Direktorat Pengolahan;
- c. Direktorat Preservasi;
- d. Direktorat Pemanfaatan.

4. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang informasi dan pengembangan Sistem Kearsipan Nasional.

Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan terdiri dari:

- a. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan;
- b. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan.

Selain itu terdapat tiga unit kerja Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala ANRI melalui Sekretaris Utama yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan dan Inspektorat, dengan tugas sebagai berikut:

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kearsipan.

2. Pusat Jasa Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program di bidang jasa kearsipan.
3. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan ANRI.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP 2010

LAKIP ini disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dalam rangka memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LAKIP sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dituangkan dalam suatu Sistem AKIP.

Maksud dan tujuan LAKIP ini adalah sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada publik yang diwakili oleh lembaga legislatif dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja ANRI dalam melaksanakan visi dan misinya, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya LAKIP ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja ANRI selama tahun 2010. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2010 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) sebagai tolok ukur keberhasilan ANRI dalam tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kearsipan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI adalah sebagai berikut:

Bab I– Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil ANRI dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2010.

Bab II– Rencana Strategis, menjelaskan muatan Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014, Indikator Kinerja Utama ANRI Tahun 2010 dan Penetapan Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010.

Bab III–Pencapaian Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban kinerja terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2010.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis ANRI tertuang dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014. Pada hakekatnya rencana strategis merupakan upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui program dan kegiatan kebijakan pembinaan, penataan, perbaikan, penerbitan, penyempurnaan, dan pembaharuan terhadap sistem, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan kewenangannya berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah enam kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

VISI DAN MISI

Visi Arsip Nasional Republik Indonesia adalah "**Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa.**"

Arsip merupakan bukti dari dinamika sejarah perjalanan bangsa. Melalui arsip kita dapat mengetahui keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami bangsa ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Arsip mengandung informasi yang berisi bukti historis, nilai budaya dan harkat kebangsaan, yang dapat menjalin dan

mempertautkan keanekaragaman daerah dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi ANRI sebagai berikut:

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Memberikan akses kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Dalam mewujudkan visi dan misi ANRI, sesuai dengan tugas dan fungsi ANRI serta kewenangan yang ada, ANRI telah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah di bidang kearsipan yang tertuang dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014 sebagai berikut:

1. Tujuan

Sesuai dengan tugas dan fungsi, visi dan misi ANRI, tujuan pembangunan bidang kearsipan adalah

- a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;
- b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;

- d. Menjamin kepentingan perlindungan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- e. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
- f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan identitas dan jati diri sebagai bangsa; dan;
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

2. Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi ANRI, sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada, ANRI telah menetapkan sasaran jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia dengan tujuan adalah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan pengelolaan arsip yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) di lingkungan lembaga aparatur negara:
 - a) Tersedianya hasil kajian penyelenggaraan kearsipan yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi;
 - b) Terbangunnya Sistem Informasi Kearsipan Statis yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKS-TIK) di lembaga kearsipan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 - c) Terbangunnya Sistem Informasi Kearsipan Dinamis yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK) di lembaga kearsipan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- 2. Mewujudkan usaha-usaha pembinaan kearsipan secara nasional di lingkungan lembaga aparatur negara:

- a) Tersedianya kompetensi arsiparis dan pengelolaan arsip yang profesional dan sejahtera;
 - b) Tersedianya peraturan yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi SDM kearsipan;
 - c) Terakreditasinya lembaga dan unit kearsipan serta sertifikasinya arsiparis di pusat dan daerah;
 - d) Tersedianya kebijakan nasional pembangunan kearsipan di pedesaan;
 - e) Terlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Statis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKS-TIK) dan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK) di lembaga kearsipan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota;
 - f) Terlaksananya bimbingan teknis kearsipan di lembaga negara/badan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
3. Mewujudkan usaha penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen negara:
- a) Terselamatkan dan terlestarikannya arsip/dokumen negara yang bernilai pertanggungjawaban nasional seperti arsip pemilu legislatif dan presiden serta pilkada;
 - b) Meningkatnya pengolahan arsip demi terwujudnya inventarisasi arsip yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik;
 - c) Meningkatnya preservasi arsip demi terwujudnya pemeliharaan, penataan dan keamanan arsip dari bahaya kerusakan fisik maupun informasinya;
 - d) Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan arsip untuk kepentingan pemerintah, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan.

Untuk mempercepat pencapaian ketiga sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan sasaran pendukung yaitu "Mewujudkan koordinasi dalam perencanaan, pembinaan, pengendalian program, administrasi dan sumber daya di lingkungan ANRI secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang kinerja ANRI" dengan target kinerja adalah:

1. Terwujudnya kebijakan kearsipan nasional berupa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel serta tepat waktu;
3. Meningkatnya jumlah peraturan kearsipan;
4. Meningkatnya jumlah instansi/lembaga yang menggunakan jasa kearsipan;
5. Berkurangnya jumlah temuan dalam pengawasan internal.

Bertitik tolak dari Sasaran Pembangunan Bidang Kearsipan Jangka Menengah Tahun 2010-2014, maka program prioritas pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2010 secara garis besar adalah:

1. Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS-TIK) pada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dan Terlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berbasis TIK (SKD-TIK) instansi pusat;
2. Tersedianya Peraturan Pemerintah untuk Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Tersedianya peraturan yang akan dijadikan data base sebanyak 500 Peraturan Pusat dan Daerah, 70 referensi hukum di 20 unit kerja di lingkungan ANRI; Tersusunnya standar prosedur operasional unit kerja di lingkungan ANRI sebanyak 25 Standar Prosedur Operasional.
4. Terlaksananya kegiatan monitoring dan penyelamatan arsip pemilu tahun 2009 di KPU Pusat dan KPU Provinsi, penilaian dan akuisisi arsip Kabinet Indonesia Bersatu di 15 instansi; penyelamatan dan pelestarian arsip akibat bencana alam dan penanggulangannya di 6 daerah; pengamanan arsip melalui sistem *barcode*, 1 sistem *barcode*.
5. Terlaksananya kerja sama pengembangan kearsipan dengan beberapa perguruan tinggi (5 naskah kerja sama dengan perguruan tinggi di beberapa daerah).
6. Tersusunnya 1 (satu) naskah norma standar arsip dinamis, dan 2 (dua) naskah standar/pedoman arsip statis; terlaksananya pengkajian penyelenggaraan kearsipan dinamis di kantor desa/kelurahan (1 naskah hasil kajian).

7. Tersedianya pemberian Bantuan Beasiswa untuk program studi Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana sebanyak 100 orang, terlaksananya diklat teknis melalui Dana Dekonsentrasi di 33 Provinsi, a) Kursus/Training Dalam Negeri: Kursus Bahasa Belanda 45 orang; Bahasa Arab Melayu 30 orang; Bahasa Jawa Kuno 30 orang; Bahasa Inggris (45 orang, UGM 10 orang, UI 3 orang); Kursus Komputer 10 orang; Kursus Internet 30 orang; b) Kursus/Training Kearsipan di Luar Negeri 5 orang.
8. Terlaksananya layanan talk show Sosialisasi Diorama Sejarah Perjalananan Bangsa sebanyak 3 kali *talk show* di televisi, 3 kali *talk show* diradio, 3 (tiga) buah iklan di televisi dengan 60 kali tayangan di 2 televisi, 3 buah iklan di radio dengan 60 kali siaran di 3 stasiun radio.
9. Terlaksananya bimbingan konsultasi arsip masuk desa, 578 orang pada 7 Provinsi.
10. Terlaksananya pengadaan mobil "Masyarakat Sadar Arsip" untuk 14 Provinsi;
11. Tersusunnya naskah sumber arsip Citra Daerah (4 Kab/Kota), Citra Nusantara jilid V (1 naskah), Perjanjian Perbatasan Wilayah Republik Indonesia jilid V (1 naskah), Penerbitan Khasanah Arsip Citra Daerah (1 naskah).
12. Terlaksananya lanjutan pembangunan gedung khusus (gedung pengolahan 8 lantai).
13. Terlaksananya pengadaan peralatan kantor di Pusdiklat ANRI-Bogor (1 paket).

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka ANRI telah menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan ANRI untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014.

Indikator Kinerja Utama ANRI adalah:

- 2.2.1 Presentase Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah yang mengelola arsipnya sesuai dengan NSPK Bidang Kearsipan;
- 2.2.2 Jumlah Arsip Statis yang dilestarikan;
- 2.2.3 Jumlah Akses Publik terhadap Arsip Statis.

2.3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2010

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Penetapan kinerja Kepala ANRI Tahun 2010 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2010 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2010 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 04A Tahun 2010 tentang Rencana Kinerja Tahunan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010. ANRI telah membuat penetapan kinerja tahun 2010 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2010. Namun dalam penyusunan LAKIP Tahun 2010, sasaran yang akan dianalisis adalah sasaran yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis yang merupakan gambaran sasaran ANRI yang

sebenarnya. Adapun rencana kinerja yang disesuaikan dengan sasaran dalam Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
RENCANA CAPAIAN SASARAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2010

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
I.	Mewujudkan pengelolaan arsip yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) di lingkungan lembaga aparatur negara	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	1 Presentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK	8 Hasil Kajian	1.514.372.000
			2 Jumlah Basis Data Penyelenggaraan JIKN	1 Paket Basis Data	181.874.000
			3 Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi yang sudah menerapkan SIKS-TIK	12 Provinsi	905.400.000
			4 Jumlah instansi pusat yang sudah menerapkan SIKD-TIK	10 instansi	750.000.000
II.	Mewujudkan usaha-usaha pembinaan kearsipan secara nasional di lingkungan lembaga aparatur negara		1 Jumlah lembaga/unit kearsipan dan arsiparis yang terakreditasi dan disertifikasi	6 lembaga/unit kearsipan dan 40 arsiparis	195.000.000
			2 Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis	1 Pedoman	49.516.000
			3 Jumlah peserta bimbingan arsiparis dan tim penilai	4 Pusat 5 Daerah	1.138.646.000
			4 Jumlah provinsi yang mendapatkan kendaraan layanan masyarakat sadar arsip	14 Provinsi 2 Kab/Kota	1.332.600.000
			5 Jumlah Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan Kearsipan sesuai dengan NSPK Dinamis Bidang Kearsipan	11 Pusat 18 Daerah	497.760.000
			6 Jumlah instansi pusat dan daerah yang mendapatkan supervisi kearsipan	8 Pusat 8 Daerah	372.080.000
			7 Penyusutan Jadwal Retensi Arsip	25 JRA	109.455.000
			8 Penyelenggaraan Arsip Masuk Desa	22 Kabupaten/ Kelurahan	905.400.000
			9 Pengembangan Pegawai	100 Pegawai	1.530.000.000

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
III.	Mewujudkan usaha penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen negara	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	1 Jumlah rekomendasi penilaian yang ditindaklanjuti pengakuisisian dan pemusnahan arsip	25 instansi	349.309.000
			2 Jumlah daerah bencana arsip yang diselamatkan	6 Daerah	500.400.000
			3 Jumlah daftar arsip pengolahan arsip konvensional	13 Daftar	828.263.000
			4 Jumlah Arsip Rusak yang direstorasi	3.300 lembar	1.159.451.000
			5 Jumlah Penerbitan Naskah Sumber Arsip yang terbitkan	9 Naskah	1.579.499.000

BAB III

CAPAIAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ANRI

Hasil pencapaian pada Indikator Kinerja Utama ANRI selama Tahun 2010 dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 Presentase Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah yang mengelola arsipnya sesuai dengan NSPK Bidang Kearsipan

Upaya peningkatan pembinaan kearsipan yang telah dilaksanakan secara intensif, hasilnya telah banyak menunjukkan kemajuan yang secara umum ditandai dengan banyaknya lembaga negara dan lembaga pemerintah baik di pusat maupun daerah yang melaksanakan pengelolaan arsipnya sesuai dengan kaidah/NSPK bidang kearsipan. Bila dibandingkan dengan tahun 2009 jumlah instansi yang mengelola arsipnya sesuai dengan kaidah kearsipan mengalami peningkatan sebanyak 12,8% yaitu dari 86 instansi menjadi 97 instansi pada tahun 2010. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
JUMLAH INSTANSI PUSAT DAN DAERAH
YANG TELAH MELAKUKAN PENGELOLAAN ARSIP
SESUAI DENGAN KAIDAH KEARSIPAN
DARI TAHUN 2009 S.D 2010

No	Instansi	Tahun		Perubahan		
		2009	2010	Naik	Turun	%
1.	Pusat	47	49	2	-	(+) 4,26
2.	Daerah	39	48	9	-	(+) 23,08
	JUMLAH	86	97	11		(+) 12,8

Sumber : Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI, 2010.

3.1.2 Jumlah Arsip Statis yang dilestarikan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ANRI wajib untuk melaksanakan pengelolaan arsip statis berskala nasional yang dilestarikan dari lembaga Negara, pemerintah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan. Dalam berkaitan dengan hal

tersebut, ANRI telah melaksanakan pelestarian arsip statis baik melalui pengumpulan, perawatan/pemeliharaan dan alih media.

Tabel 3
JUMLAH KHASANAH ARSIP YANG TERSIMPAN
DI ANRI

NO	MEDIA	JUMLAH		Perubahan		SATUAN
		2009	2010	Σ	%	
1.	Tekstual	27.247	27.247	-	-	Meter linier
2.	Kartografik	99.794	99.794	-	-	sheets
3.	Film	70.060	70.060	-	-	reels
4.	Video	30.125	30.125	-	-	kaset
5.	Suara	37.349	37.349	-	-	Kaset/open reels
6.	Foto	1.663.000	1.663.000	-	-	sheets (negatives + prints)
7.	Microfilm	13.648	13.648	-	-	reels (negatives)
8.	Microfische	7.200	7.200	-	-	fisches
9.	Optical Disc	427	427	-	-	Keping

Sumber: Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, 2010.

Tabel 4
PERBANDINGAN RESTORASI ARSIP FILM/VIDEO
DAN ARSIP KONVENSIONAL
TAHUN 2009 DAN 2010

No	Jenis Arsip	Tahun		Perubahan	
		2009	2010	Σ	%
1.	Arsip Film	1.000 reel	1.663 reel	(+) 663	66,3
2.	Arsip Video	1.500 reel	4.500 reel	(+) 3.000	200
3.	Arsip Konvensional	15.000 Lembar	6.915 lembar	(-) 8.085	53,9

Sumber: Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, 2010.

Tabel 5
PERBANDINGAN JUMLAH ARSIP YANG DIALIHMEDIAKAN
TAHUN 2009 DAN TAHUN 2010

No	Jenis Arsip	Tahun		Perubahan	
		2009	2010	Σ	%
1.	Alih Media ke format digital video	500 reel	500 reel	-	
2.	Alih Media Arsip ke Video (dari video ke video)	50 Kaset	50 Kaset	-	
3.	Alih Media Foto ke Digital	2.500 Lembar	2.500 Lembar	-	
4.	Alih Media Mikrofilm Positif	500 Roll	500 Roll	-	
5.	Alih Media Mikrofilm negatif	na	-		

Sumber : Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, Tahun 2010.

3.1.3 Jumlah Akses Publik terhadap Arsip Statis.

Arsip statis yang dikelola ANRI dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan baik untuk keperluan penelitian maupun untuk kegiatan komersial. ANRI membuka kesempatan yang cukup luas kepada publik untuk dapat mengakses arsip statis yang tersimpan di ANRI. Sampai dengan 31 Desember 2010 jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan arsip statis sebanyak 3.093 orang yang berarti mengalami peningkatan sebesar 435 orang (86,25%) dari tahun 2009 yang tercatat sebanyak 2.688 orang. Sedangkan jumlah arsip yang dimanfaatkan adalah sebanyak 21.449 nomor/berkas atau lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 20.643 nomor/berkas.

Tabel 6
PERBANDINGAN JUMLAH PENGUNJUNG
TAHUN 2009 DAN 2010

No	Asal Pengunjung	Jumlah Pengunjung		Jumlah Pengunjung		
		Tahun 2009	Tahun 2010	Naik	Turun	%
1.	Dalam Negeri	2.437 Orang	2.771 Orang	334	-	(+) 13,70
2.	Luar Negeri	231 Orang	322 Orang	91	-	(+) 39,40
	JUMLAH	2.668 Orang	3.093 Orang	425	-	(+) 15,93

Sumber : Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, Tahun 2010.

3.2. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2010

Selama Tahun 2010 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja ANRI. Pengukuran, evaluasi dan analisis yang disajikan dalam LAKIP ini lebih fokus pada realisasi sasaran dan bukan pada realisasi kegiatan. Secara umum ANRI telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran, ini dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja, baik makro maupun mikro, yang ditetapkan untuk masing-masing sasaran tersebut.

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah

kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauhmana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran, evaluasi, dan realisasi sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1. Mewujudkan pengelolaan arsip yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan lembaga aparatur negara

Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK	8 Kajian	8 Kajian	100%
Jumlah Basis Data Penyelenggaraan JIKN	1 Paket Basis Data	1 Paket Basis Data	100%
Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi yang sudah menerapkan SIKS-TIK	12 Provinsi	12 Provinsi	100%
Jumlah instansi pusat yang sudah menerapkan SIKD-TIK	10 instansi	10 instansi	100%

3.2.1.1 Pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK

Pengkajian kearsipan dilakukan untuk mengetahui permasalahan penyelenggaraan kearsipan pada instansi pusat maupun daerah serta sebagai masukan untuk penyempurnaan sistem kearsipan. Pengkajian kearsipan yang telah dilakukan adalah

a) Pengkajian Penyelenggaraan Kearsipan Dinamis di Kantor Kelurahan/Desa

Pengkajian penyelenggaraan kearsipan di kantor desa/kelurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta sumber daya lainnya. Kondisi tersebut akan digambarkan didalam

pengkajian ini mengingat desa/kelurahan sebagai lembaga pemerintah (publik) yang dalam melaksanakan kegiatannya langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga diharapkan ada kepedulian terhadap hak-hak keperdataan rakyat, hak-hak politik, potensi sumber daya alam desa/kelurahan dan lainnya.

Pengkajian tersebut dilaksanakan terhadap 13 (tiga belas) desa dan 13 (tiga belas) kelurahan yang mewakili 1 (satu) provinsi di beberapa wilayah yaitu: Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Papua dan Banten. Hasil kajian adalah sebagai berikut:

- ❖ Kebijakan/pedoman kearsipan baru dimiliki oleh 69% kantor desa. Belum ada kantor/desa yang memiliki kebijakan/pedoman kearsipan dinamis secara lengkap. Kebijakan/pedoman pengelolaan arsip elektronik belum dimiliki oleh mereka. Kebijakan/pedoman tata naskah dinas dan klasifikasi arsip merupakan jenis kebijakan/pedoman yang dimiliki oleh sebagian besar di kantor desa. Kebijakan/pedoman yang dimiliki oleh sebagian kecil kantor desa/kelurahan adalah JRA dan Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis.
- ❖ Pembinaan kearsipan dinamis yang telah diperoleh, baru 1 (satu) kali dalam setahun. Instansi pembina yang sering melakukan pembinaan di kantor desa adalah lembaga kearsipan kabupaten/kota, lembaga kearsipan provinsi, departemen dalam negeri dalam hal ini bagian organisasi dan tata laksana. Bentuk pembinaan kearsipan dinamis yang paling banyak dilakukan di kantor desa adalah pendidikan dan pelatihan kearsipan dan bimbingan teknis kearsipan.
- ❖ Pengelolaan arsip dinamis meliputi: Penciptaan arsip yang dilakukan meliputi registrasi surat, pendistribusian surat, dan pengendalian surat, penggunaan dan pemeliharaan arsip dinamis yang dilakukan; pemberkasan arsip aktif,

penataan arsip inaktif, layanan arsip dinamis dan pemeliharaan arsip dinamis; Penyusutan arsip dinamis yang dilakukan meliputi: pemindahan arsip, pemusnahan dan penyerahan arsip. Kantor desa pada dasarnya melaksanakan pengelolaan arsip dinamis secara lengkap, namun kantor desa belum ada satupun yang melaksanakan penyerahan arsip.

- ❖ Sumber daya manusia kearsipan dinamis di kantor adalah bahwa dari 13 (tiga belas) kantor desa yang dijadikan sampel kajian penyelenggaraan kearsipan dinamis, ada 5 (lima) kantor desa (39%) yang memiliki sumber daya manusia kearsipan tersebut, 3 (tiga) kantor desa (60%) yang merasakan sudah ada kesesuaian antara jumlah dengan kebutuhan dan kantor desa yang sudah menyediakan kesejahteraan bagi sumber daya manusia kearsipan 1 (satu) kantor desa (20%).
- ❖ Prasarana dan sarana kearsipan dinamis di kantor desa, bahwa dari 13 (tiga belas) kantor desa yang dijadikan sampel dalam pengkajian penyelenggaraan kearsipan dinamis, yang memiliki ruang tempat menyimpan arsip sebanyak 7 (tujuh) desa (54%), sarana registrasi surat sebanyak 10 (sepuluh) kantor desa (77%), sarana pengendalian surat sebanyak 6 (enam) kantor desa (46%), sarana pemberkasan arsip aktif sebanyak 8 (delapan) kantor desa (61%) sarana penataan arsip inaktif sebanyak 3 (tiga) kantor kelurahan (23%), sarana pelayanan arsip dinamis sebanyak 3 (tiga) kantor desa (23%) dan sarana pemeliharaan arsip dinamis sebanyak 3 (tiga) kantor desa (23%).
- ❖ Sumber dana anggaran kearsipan dinamis di kantor desa, bahwa dari 13 kantor desa yang dijadikan sampel dalam kajian penyelenggaraan kearsipan dinamis hanya 6 (enam) kantor desa (46%) yang memiliki sumber dana anggaran kearsipan dinamis. Sumber dana mereka 4 (empat) kantor desa (66%) memperoleh anggaran dari

APBN/APBD, 1 (satu) kantor desa (17%) memperoleh dari dana masyarakat, serta 1 (satu) kantor desa (17%) memperoleh dari kas desa.

Sedangkan hasil kajian pada kegiatan ini adalah:

- ❖ Kebijakan/pedoman kearsipan baru sebagian yang dimiliki oleh seluruh kantor kelurahan. Tidak ada kantor kelurahan yang memiliki kebijakan/pedoman kearsipan dinamis secara lengkap. Kebijakan/pedoman pengelolaan arsip elektronik dan program arsip vital belum memiliki. Kebijakan/ pedoman tata naskah dinas dan klasifikasi arsip adalah jenis kebijakan/program yang dimiliki oleh sebagian besar di kantor kelurahan.
- ❖ Pembinaan kearsipan dinamis telah dilaksanakan lebih dari 50% kantor kelurahan. Frekwensi pembinaan yang mereka peroleh baru 1 (satu) kali dalam setahun. Instansi pembina yang sering melakukan pembinaan di kantor kelurahan adalah Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota, Lembaga Kearsipan Provinsi, Departemen Dalam Negeri dalam hal ini bagian organisasi dan tata laksana. Lembaga Kearsipan Nasional yaitu ANRI belum pernah membina kantor kelurahan. Bentuk pembinaan kearsipan dinamis yang paling banyak dilakukan di kantor kelurahan adalah bimbingan teknis kearsipan dan monitoring/pengawasan/supervisi, JRA dan pedoman pemeliharaan arsip dinamis.
- ❖ Pengelolaan arsip dinamis meliputi: Penciptaan arsip yang dilakukan: registrasi surat, pendistribusian surat, dan pengendalian surat; penggunaan dan pemeliharaan arsip dinamis yang dilakukan: pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, layanan arsip dinamis, dan pemeliharaan arsip dinamis; penyusutan arsip dinamis yang dilakukan meliputi: pemindahan arsip, pemusnahan, dan penyerahan arsip. Kantor kelurahan pada dasarnya melaksanakan pengelolaan arsip dinamis secara lengkap.
- ❖ SDM kearsipan dinamis di kantor kelurahan, adalah bahwa dari 13 kantor kelurahan yang dijadikan sampel kajian

hanya 5 (lima) kantor kelurahan (39%) yang memiliki sumber daya manusia kearsipan. Dari 5 (lima) kantor kelurahan yang memiliki SDM kearsipan hanya 2 (dua) kantor kelurahan (4%) yang merasakan sudah ada kesesuaian antara jumlah dengan kebutuhan. Belum ada kantor kelurahan yang menyediakan kesejahteraan bagi SDM Kearsipan.

- ❖ Prasarana dan sarana kearsipan dinamis di kantor kelurahan bahwa dari 13 (tiga belas) kantor kelurahan yang dijadikan sampel dalam pengkajian penyelenggaraan kearsipan dinamis, yang memiliki ruang tempat penyimpanan arsip sebanyak 6 (enam) kantor kelurahan (46%), sarana registrasi surat sebanyak 9 (sembilan) kantor kelurahan (69%), sarana pengendalian surat sebanyak 9 (sembilan) kantor kelurahan (66%), sarana pemberkasan arsip aktif sebanyak 5 (lima) kantor kelurahan (39%), sarana penataan arsip inaktif sebanyak 3 (tiga) kantor kelurahan (23%), sarana pelayanan arsip dinamis sebanyak 3 (tiga) kantor kelurahan (23%).
- ❖ Sumber dana anggaran kearsipan dinamis di kantor kelurahan bahwa 13 (tiga belas) kantor desa yang dijadikan sampel dalam kajian penyelenggaraan kearsipan dinamis, hanya 5 (lima) kantor kelurahan (39%) yang memiliki sumber dana anggaran kearsipan dinamis, yang lainnya berdasarkan APBN/APBD.

b) Pengkajian Penyelenggaraan Kearsipan pada Universitas (Perguruan Tinggi Negeri)

Penyelenggaraan kearsipan pada perguruan tinggi negeri di wilayah Kalimantan merupakan penelitian jenis deskriptif untuk mengetahui apakah telah ada penyelenggaraan kearsipan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah Kalimantan dengan melihat 2 (dua) dimensi yaitu dimensi penyelenggaraan kearsipan dinamis dan kearsipan statis.

Penelitian ini dilakukan terhadap 8 (delapan) Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Kalimantan yaitu: Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Mulawarman, Universitas Tanjungpura, Universitas Palangkaraya, IAIN Antasari, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda, STAIN Pontianak, dan STAIN Palangkaraya.

Penataan ini berangkat dari pertanyaan umum (*grand tour question*) yaitu "apakah ada penyelenggaraan kearsipan pada PTN di wilayah Kalimantan?" berikutnya sub pertanyaan (*sub question*) yaitu: "apakah ada kebijakan, pembinaan, pengelolaan, prasarana dan sarana, SDM, pendanaan kearsipan dalam penyelenggaraan kearsipan pada PTN di wilayah Kalimantan?". Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan instrumen pengumpulan data berupa kuisioner.

Data primer kuantitas yang diperoleh dari jawaban responden pada kuisioner itu selanjutnya ditabulasi dengan menggunakan skala pengukuran *Skala Guttman* yang dikuantitatifkan dalam bentuk *score* dengan jawaban ya (skor 1) dan tidak (skor 0), kemudian ditafsirkan dalam bentuk kualitatif. Hipotesis penelitian ini dalam bentuk hipotesis nol yang dinyatakan dalam kalimat negatif yaitu "belum ada penyelenggaraan kearsipan pada perguruan tinggi di wilayah Kalimantan".

Berdasarkan hasil pembahasan maka diperoleh hasil penelitian bahwa penyelenggara kearsipan telah memperlihatkan adanya penyelenggaraan kearsipan dinamis yang dilakukan oleh perguruan tinggi, namun dalam penyelenggaraan kearsipan statis belum dilakukan. Dalam pengujian hipotesis ini statistik diperoleh:

$H_0: u \leq 28,01 \% \leq (0,2801 \times 68) = 19,0468\%$ (ditolak)

$H_a: u \geq 28,01\% \geq (0,2801 \times 68) = 19,0468\%$ (diterima)

Dengan demikian hipotesis nol (H_0) dalam bentuk pertanyaan "belum ada penyelenggaraan kearsipan pada PTN di wilayah Kalimantan" ditolak dan sebaliknya hipotesis alternatif (H_a) diterima artinya "telah ada penyelenggaraan kearsipan pada PTN di wilayah Kalimantan".

Berdasarkan hasil analisis terhadap variabel, dimensi dan indikator penelitian, maka dirumuskan rekomendasi penelitian adalah sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Kearsipan Dinamis

a. Arsip Nasional Republik Indonesia

ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan dan bertanggungjawab terhadap pembinaan kearsipan dinamis nasional khususnya kepada PTN di wilayah Kalimantan perlu menyusun kebijakan pembinaan kearsipan nasional yang berkesinambungan untuk menjamin hak dan kewajiban lembaga kearsipan serta masyarakat dalam mengakses dan pemanfaatan arsip dinamis yang autentik dan reliabel pada PTN di wilayah Kalimantan.

b. PTN di wilayah Kalimantan

PTN di wilayah Kalimantan selaku pencipta arsip perlu meningkatkan pengelolaan arsip dinamis sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan kearsipan untuk menjamin hak dan kewajiban PTN serta masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan arsip dinamis yang autentik dan reliabel pada PTN di wilayah Kalimantan.

2) Penyelenggaraan Kearsipan Statis

a. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan dan bertanggungjawab terhadap pembinaan kearsipan statis nasional khususnya kepada PTN di wilayah

Kalimantan perlu menyusun kebijakan pembinaan kearsipan nasional yang berkesinambungan untuk menjamin hak dan kewajiban lembaga kearsipan serta masyarakat dalam mengakses dan pemanfaatan arsip statis yang autentik dan reliabel pada PTN di wilayah Kalimantan.

b. **Arsip Perguruan Tinggi**

Arsip Perguruan Tinggi sebagai lembaga kearsipan PTN di wilayah Kalimantan merupakan organisasi mandiri dan otonom yang dimiliki dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pada PTN di wilayah Kalimantan perlu meningkatkan penyelenggaraan kearsipan statis, sehingga dapat menyelenggarakan kearsipan statis untuk menjamin hak dan kewajiban lembaga kearsipan pada PTN di wilayah Kalimantan serta masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan arsip statis yang autentik dan reliabel pada PTN di wilayah Kalimantan.

c) **Pengkajian Penyelenggaraan Kearsipan Statis pada Lembaga Kearsipan Provinsi (LKP)**

Penyelenggaraan kearsipan di provinsi menjadi tanggungjawab pemerintahan daerah provinsi dan dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Provinsi (LKP) yang merupakan salah satu elemen penyelenggaraan kearsipan statis nasional. Dengan demikian maka LKP dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang didukung dengan beberapa aspek yaitu aspek kebijakan kearsipan statis, pembinaan kearsipan statis, pengelolaan arsip statis, prasarana dan sarana kearsipan statis, SDM pengelolaan arsip statis dan pendanaan arsip statis.

Penelitian dengan judul "**Kajian Penyelenggaraan Kearsipan Statis pada Lembaga Kearsipan Provinsi di Wilayah Kalimantan**" merupakan penelitian jenis deskriptif

untuk melihat bagaimana penyelenggaraan kearsipan statis pada LKP dilihat dari aspek tersebut.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan umum, yakni "bagaimana penyelenggaraan kearsipan pada LKP di wilayah Kalimantan?. Selanjutnya diturunkan ke sub-sub pertanyaan penelitian yakni "bagaimana dari aspek tersebut dalam penyelenggaraan kearsipan statis?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, pengamatan dan kuisioner.

Berdasarkan hasil penelitian pada umumnya sudah memadai kecuali hasil temuan pada wilayah Kalimantan Tengah. Penelitian ini juga merumuskan rekomendasi kepada:

- 1) Arsip Nasional Republik Indonesia
Sebagai lembaga kearsipan nasional perlu menyusun strategi penyelenggaraan kearsipan statis pada lembaga kearsipan provinsi.
- 2) LKP di wilayah Kalimantan perlu meningkatkan penyelenggaraan kearsipan statis di wilayah kerja masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a. LKP Kalimantan Barat perlu meningkatkan terhadap dimensi prasarana dan sarana kearsipan statis.
 - b. LKP Kalimantan Tengah perlu peningkatan terhadap dimensi pembinaan kearsipan statis, pengelolaan arsip statis, prasarana dan sarana kearsipan statis, SDM pengelola arsip statis dan pendanaan kearsipan statis.
 - c. LKP Kalimantan Selatan perlu peningkatkan terhadap dimensi kebijakan kearsipan statis.
 - d. LKP Kalimantan Timur perlu peningkatkan terhadap

indikator pendanaan kegiatan pelayanan akses arsip statis.

d) **Pengkajian Pengelolaan Arsip untuk Aktivitas Berbasis Web di Lingkungan Pemerintahan**

Kajian ini memfokuskan pada kebutuhan pengelolaan arsip untuk aktivitas berbasis web dalam rangka mendukung arsip sebagai (1) tulang punggung manajemen dan pemerintahan; (2) obyek layanan informasi publik, yang terjamin akurasi, autentisitas, auditnya, serta diterimanya konten web dan transaksi berbasis web (3) bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah; (4) arsip yang autentitasnya terpelihara selama digunakan, serta (5) bahan yang bernilai guna kesejahteraan dan penelitian di lembaga kearsipan.

Hasil analisis terhadap kajian kepustakaan menghasilkan kesimpulan bahwa (1) identifikasi aktivitas berbasis web pada lembaga pemerintah yang menciptakan arsip perlu dilakukan untuk memudahkan pengelolaan arsip; (2) penentuan jenis informasi berbasis web yang merupakan arsip perlu dibuat untuk menentukan ruang lingkup pengelolaan arsip; (3) pertimbangan jenis informasi berbasis web yang merupakan arsip perlu dibuat untuk menentukan ruang lingkup pengelolaan arsip; (4) Penilaian resiko dan faktor-faktor pertimbangannya perlu dilakukan untuk dapat mengurangi resiko dalam pengelolaan arsip; serta (5) isu penyimpanan dan preservasi terhadap arsip untuk aktivitas berbasis web perlu dicermati dalam upaya menyusun strategi penyimpanan dan preservasi arsip.

Kajian ini menghasilkan rekomendasi bahwa perubahan perilaku di kalangan pengguna internet memerlukan

perubahan dalam tata cara berkomunikasi bagi kebanyakan lembaga pemerintah dengan menggunakan teknologi web. Pengaruh web 2.0 menurut Don Tapscott dan Anthony D Williams (2009) menciptakan paradigma baru "*wikinomics*" berdasarkan kolaborasi massa, Wikinomics berdasarkan pada empat prinsip utama: keterbukaan, menatap tajam, berbagi, dan bertindak secara global. Mengingat teknologi web tersebut telah banyak menciptakan arsip, maka pengelolaan arsip untuk aktivitas berbasis web sudah merupakan kebutuhan bagi lembaga pemerintah saat ini. Referensi pedoman dari beberapa arsip nasional di luar negeri dapat diambil sebagai rujukan, atau paling cepat adalah dengan mengadopsi salah satu pedoman dari salah satu arsip nasional tersebut.

e) **Pengkajian Manajemen Perubahan dalam Pengelolaan Arsip Elektronik**

Kegiatan ini memfokuskan pada pengkajian terhadap kesiapan organisasi dalam proses perubahan di lingkungan kerja elektronik, khususnya dalam pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis yang dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di instansi pemerintah, dengan memperhatikan pada keterbatasan yang dimiliki dan memahami pola perubahan yang dapat dilakukan perubahan untuk mengubah keterbatasan tersebut.

Kajian empiris dilakukan pada 12 (dua belas) lembaga kearsipan daerah yaitu:(1) Kantor Arsip dan Dokumentasi Sragen Jawa Tengah; (2) Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah; (3) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana, Bali; (4) Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Jawa Barat; (5) Kantor dan Perpustakaan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;

(6) Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Manado, Sulawesi Utara; (7) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur; (8) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Tebing Tinggi, Sumatera Utara; (9) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah; (10) Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; (11) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat; serta (12) Kantor Arsip Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.

Kajian kepustakaan dilakukan terhadap beberapa referensi yang banyak membahas tentang manajemen perubahan. Hasil analisis terhadap kajian empiris dan kepustakaan memperlihatkan bahwa meskipun faktor pendorong perubahan telah muncul di sebagian instansi yang diamati yaitu daya tarik yang kuat untuk bergerak ke depan karena perubahan teknologi dengan mendukung pengelolaan arsip elektronik, namun apabila tidak didukung dengan perumusan strategi yang baik dalam analisis misi, visi dan kinerja organisasi serta tidak perilaku staf atau sistem sosial yang ada dalam organisasi, maka ada kemungkinan organisasi gagal mencapai kesuksesan dalam perubahan. Faktor penghambat lainnya untuk mencapai kesuksesan dalam perubahan adalah apabila tidak dilakukan identifikasi arsip elektronik, pengelolaan metadata arsip elektronik secara efektif, penyediaan repositori arsip elektronik, serta penyusunan rancangan implementasi sistem.

Disisi lain, kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang efektif, keselarasan antara tujuan pegawai dan tujuan organisasi, serta penjelasan yang kuat untuk melakukan perubahan faktor

keberhasilan yang akan meningkatkan pemahaman staf terhadap proses perubahan yang berlangsung.

Kajian ini menghasilkan rekomendasi tentang: (1) beberapa strategi perubahan yang dapat digunakan dalam merencanakan perubahan; (2) tahapan proses perubahan yang dapat diikuti; serta (3) contoh penyusunan rancangan manajemen perubahan sesuai dengan visi dan tujuan perubahan yang diinginkan dipadu dengan hasil identifikasi kondisi dalam organisasi.

f) **Pengkajian Efektivitas Sistem Aplikasi JIKN**

Kajian ini memfokuskan pada analisis teknis terhadap aplikasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional dalam rangka mendukung efektivitas sistem baik dari sisi pengguna untuk mencari informasi kearsipan pada skala nasional yang terdapat atau dikelola oleh anggota jaringan di seluruh Indonesia, maupun dari sisi administrator di pusat jaringan nasional dalam rangka mengelola basisdata arsip statis secara nasional serta mengelola Portal JIKN.

Hasil analisis dilakukan dengan melakukan perbandingan antara ketentuan-ketentuan fungsional kesisteman dari Aplikasi JIKN, yang meliputi:

- ❖ Fungsional dalam hal pemanfaatan informasi kearsipan
Antarmuka pengguna pada Portal JIKN

Kajian dilakukan terhadap operasionalisasi teknis dari menu-menu Galeri Arsip, Pencarian Arsip (Pencarian mudah dan pencarian lengkap), *Bookmark*, Melihat Kopi Digital Arsip, Pameran Virtual, Link ke Anggota Jaringan, Link ke Lembaga Kearsipan Internasional, Pendaftaran Pengguna, Pemesanan Arsip.

Antarmuka Administrator pada Portal JIKN

Kajian dilakukan terhadap operasional teknis dan menu-menu Manajemen Halaman Statis, Manajemen Galeri Arsip, Manajemen Pameran Virtual, Manajemen Link ke Anggota Jaringan dan Ke Lembaga Kearsipan Internasional, Pendaftaran Pengguna, Manajemen Pemesanan Arsip.

Modul Penghimpun Data (MPD)

Kajian dilakukan terhadap operasionalisasi teknis untuk melakukan input data informasi arsip statis termasuk input kopi digital dan ekspor data ke server Portal JIKN.

- ❖ Fungsional dalam hal manajemen dan perancangan sistem Kajian dilakukan terhadap masalah ketergunaan (*usability*); Pelaporan; Administrasi Sistem (proses data, penghapusan arsip, penyimpanan, backup dan pemulihan), serta Perancangan Sistem (kinerja, skalabilitas, keandalan dan kontrol dari aplikasi).

Kajian ini menghasilkan rekomendasi, yakni:

- ❖ Terdapat beberapa penambahan fungsi yang sebelumnya tidak ada karena adanya tuntutan perubahan, terutama dalam rangka memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan pembangunan JIKN.
- ❖ Terdapat beberapa fungsi yang telah ada, namun perlu disempurnakan dalam rangka peningkatan kinerja sistem (*system performance*), keandalan sistem (*system reability*) serta skalabilitas sistem (*system scalability*), disamping juga dalam rangka mendukung kemudahan dan efektivitas penggunaan baik dari sisi pengguna akhir maupun administrator sistem.

g) **Pengkajian Efektivitas Sistem Pengelolaan Arsip Dinamis**

Kajian ini memfokuskan pada analisa teknis terhadap aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dalam rangka mendukung efektivitas sistem baik dari sisi pengguna akhir maupun dari sisi administrator pengguna dan administrator sistem.

Hasil analisis dilakukan dengan melakukan perbandingan antara ketentuan-ketentuan fungsionalitas kesisteman dari Aplikasi SIKD, yang meliputi:

❖ **Manajemen Arsip Dinamis**

Kajian ini dilakukan terhadap operasionalisasi teknis dari menu-menu control (skema klasifikasi arsip, manajemen folder, metadata control) Akses dan Keamanan (akses sistem, control akses dan keamanan, profil pengguna, pengaturan struktur organisasi/jabatan, penerapan akses dan keamanan; penyusutan (jadwal retensi arsip, penerapan penyusutan, laporan penyusutan); Pencarian dan Temu Balik (pencarian, temu balik, pencetakan); Metadata (konfigurasi metadata); Kesesuaian dengan Peraturan (peraturan perundangan, standar dan pedoman).

❖ **Manajemen dan Perancang Sistem**

Kajian dilakukan ketergunaan (*usability*) aplikasi (antarmuka pengguna, ketergantungan dari fungsi-fungsi sistem); Administrasi Sistem (proses data, penghapusan arsip, penyimpanan, backup dan pemulihan, preservasi) perancangan sistem (kinerja, skalabilitas, keandalan dan kontrol).

Kajian ini menghasilkan rekomendasi yakni:

- ❖ Terdapat beberapa penambahan fungsi yang sebelumnya tidak ada karena adanya tuntutan perubahan, terutama

dalam rangka memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan pengelolaan arsip dinamis.

- ❖ Terdapat beberapa fungsi yang telah ada, namun perlu disempurnakan dalam rangka peningkatan kinerja sistem (*system performance*), keandalan sistem (*system reability*) serta skalabilitas system (*system scalability*), disamping juga dalam rangka mendukung kemudahan dan efektifitas penggunaan baik dari sisi pengguna akhir maupun administrator sistem.
- ❖ Fungsi tambahan lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah yang berkaitan dengan keamanan Online (meliputi enkripsi, tanda tangan digital, autentikasi, manajemen kunci kriptografi, serta digital watermark); dan fungsi yang berkaitan dengan Alir Kerja (*workflow*).

h) **Pengkajian Efektivitas Sistem Pengelolaan Arsip Statis**

Kajian ini memfokuskan pada analisa teknis terhadap aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) dalam rangka mendukung efektivitas sistem baik dari sisi pengguna akhir maupun dari sisi administrator pengguna dan administrator sistem.

Hasil analisis dilakukan dengan melakukan perbandingan antara ketentuan-ketentuan fungsionalitas kesisteman dari Aplikasi SIKD, yang meliputi:

- ❖ Fungsionalitas dalam hal layanan bagi pengguna

Antarmuka Layanan Akses

Kajian dilakukan terhadap operasionalisasi teknis dari menu-menu Galeri Arsip, Pencarian Arsip (pencarian mudah dan pencarian lengkap), *Bookmark*, Melihat Kopi

Digital Arsip, Pameran Virtual, Pendaftaran Pengguna, Pemesanan Arsip.

Antarmuka Administrator Layanan Akses

Kajian dilakukan terhadap operasionalisasi teknis dari menu-menu Manajemen Halaman Statis, Manajemen Galeri Arsip, Manajemen Pameran Virtual, Manajemen Pemesanan, Pendaftaran Pengguna.

- ❖ Fungsional dalam hal Manajemen Arsip Statis

Pengaturan

Kajian dilakukan terhadap operasionalisasi teknis dari menu-menu pengaturan identitas lembaga, jabatan pengguna dan identitas pengguna.

Pengolahan

Kajian dilakukan terhadap operasionalisasi teknis dari menu-menu yang dijalankan fungsi perancangan informasi arsip statis dan pembuatan inventaris termasuk memasukan kopi digital.

Penyimpanan

Kajian dilakukan terhadap operasionalisasi teknis dari menu-menu yang dijalankan fungsi pengaturan lokasi penyimpanan arsip, penempatan arsip, pencarian fisik arsip dan informasi mengenai status penggunaan.

Preservasi

Kajian dilakukan terhadap operasionalisasi teknis dari menu-menu yang dijalankan fungsi melakukan penjadwalan pemeriksa fisik arsip, mengelola restorasi arsip statis dan mengelola reproduksi arsip statis.

- ❖ Fungsional dalam hal manajemen dan perancangan sistem
Kajian dilakukan terhadap masalah ketergunaan (*usability*); Administrasi Sistem (proses data, penghapusan arsip, penyimpanan, backup dan

pemulihan), serta Perancangan Sistem (kinerja), skalabilitas, kendala dan kontrol aplikasi.

Kajian ini menghasilkan rekomendasi, yakni:

- ❖ Terdapat beberapa penambahan fungsi sebelumnya tidak ada karena adanya tuntutan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan pengelolaan arsip statis.
- ❖ Perlunya penambahan fungsi berkaitan dengan ekspor impor data untuk kebutuhan JIKN.
- ❖ Terdapat beberapa fungsi yang telah ada, namun perlu disempurnakan dalam rangka peningkatan kinerja sistem, keandalan sistem, serta skalabilitas sistem, disamping juga dalam rangka mendukung kemudahan dan efektivitas penggunaan baik dari sisi pengguna akhir maupun administrator sistem.

3.2.1.2 Penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

Dalam rangka mewujudkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai bagi seluruh komponen yang terlibat didalamnya termasuk lembaga kearsipan daerah sebagai anggota (simpul) jaringan.

Dalam rangka pembinaan anggota jaringan ANRI berusaha untuk meningkatkan jumlah Lembaga Kearsipan Daerah yang dapat menerapkan Sistem Kearsipan Statis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

- ❖ **Penambahan Basisdata Arsip Pilkada pada JIKN**
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI sebagai pusat jaringan

nasional serta lembaga kearsipan provinsi, lembaga kearsipan kabupaten/kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi sebagai simpul jaringan.

Penambahan basisdata pada JIKN dilakukan secara kontinyu dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kearsipan kepada masyarakat, kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat, dan peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan. Penambahan basisdata arsip pada JIKN sejumlah 28.703 record. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7
JUMLAH BASIS DATA ARSIP PILKADA PADA JIKN
TAHUN 2010

NO	PENGELOLA	INVENTARIS	
1.	ANRI	Arsip Pilkada	
		1.	KPU Prov. Sulawesi Tengah
		2.	KPU Prov. Nusa Tenggara Barat
		3.	KPU Prov. Nanggroe Aceh Darussalam
		4.	KPU Prov. Sumatera Selatan
		5.	KPU Prov. Bangka Belitung
		6.	KPU Prov. Gorontalo
		7.	KPU Prov. Jawa Timur
		8.	KPU Prov. Bali
		9.	KPU Kab. Rote Ndao (NTT)
		10.	KPU Kab. Poso
		11.	KPU Kab. Aceh Utara
		12.	KPU Pidie Jaya
		13.	KPU Kab. Gorontalo
		14.	KPU Kab. Tapanuli Utara
		15.	KPU Kab. Sumedang
		16.	KPU Kab. Garut
		17.	KPU Kab. Tangerang
		18.	KPU Kab. Sanggau
		19.	KPU Kab. Subang
		20.	KPU Kab. Bandung
		21.	KPU Kab. Banjar
		22.	KPU Kab. Pontianak
		23.	KPU Kab. Singkawang
2.	Prov. Jawa Tengah	1.	Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan
		2.	KUA Tumanggung

NO	PENGELOLA	INVENTARIS	
		3.	Biro Otonomi Daerah
		4.	Kanwil Departemen Penerangan
		5.	Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa
		6.	Mengkunegara IV
		7.	Mangkunegara V
		8.	Kabupaten Pati
		9.	BP-7 Jawa Tengah
		10.	BP-7 Yogyakarta
		11.	Kantor PPH Banjar Negara
		12.	Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda
		13.	Transmigrasi Purbalingga
		14.	Departemen Transmigrasi dan PPH Jawa Tengah
3.	Prov. Sulawesi Tenggara	1.	Sekretariat Daerah Sulawesi Tenggara
		2.	Pemprov. Sulawesi Tenggara (arsip pertanahan)
4.	Prov. Sumatera Barat	1.	INS Kayu Tanam
		2.	Madrasah Tarbiyah Islamiyah
		3.	National Archief Belanda
		4.	Tambang Batu Bara Ombilin
		5.	Tokoh Emil Salim
5.	Prov. Kalimantan Selatan	1.	Pemprov. Kalimantan Selatan (Fond 2)
		2.	Pemprov Kalimantan Selatan (Fond 6)
		3.	Pembantu Gubernur Prov. Kalimantan Selatan di Kandang
		4.	Pembantu Gubernur Prov. Kalimantan Selatan
6.	Kabupaten Merangin, Prov. Jambi	1.	Pemerintah Daerah Kab. Merangin I
		2.	Pemerintah Daerah Kab. Merangin II
		3.	Pemerintah Daerah Kab. Merangin III (Kantor Camat Tabir)
7.	Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah	1.	Kab. Pati

❖ **Pengelolaan Isi Portal JIKN**

Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip statis secara nasional. JIKN akan menjadi pintu gerbang akses ke informasi khazanah arsip statis yang dikelola oleh anggota (simpul) jaringan, yang meliputi ANRI,

arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip daerah perguruan tinggi yang tersebar diseluruh Indonesia. Melalui JIKN, himpunan kekayaan informasi kearsipan mulai abad ke-17 hingga saat ini dapat diakses oleh masyarakat dengan menggunakan internet.

Dengan JIKN, masyarakat dapat mencari informasi khazanah arsip statis di seluruh Indonesia, mengakses situs anggota (simpul) jaringan dan melihat foto, peta dokumen/naskah, khazanah arsip dalam format lainnya yang telah digitalisasi serta melihat pameran tematik virtual, galeri, berita JIKN, dan keluhan pengguna. Maksud pengelolaan isi portal JIKN adalah untuk mewujudkan tujuan dari JIKN agar layanan arsip Indonesia yang bersifat *online* dapat diakses secara lengkap, cepat, tepat, mudah dan murah, menjaga ketersediaan layanan informasi khazanah arsip statis yang aktual.

Portal JIKN harus dikelola secara andal, utuh, sesuai peraturan, menyeluruh dan sistematis. Portal JIKN dikelola oleh ANRI selaku pusat jaringan nasional, sehingga ANRI berkewajiban untuk mengelola isi portal secara terus menerus dan berkesinambungan dengan merancang sistem sedemikian rupa sehingga memiliki karakteristik yang telah disyaratkan dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arsip kertas maupun arsip foto pada galeri yang dimuat setiap bulan dalam portal JIKN tahun 2010 adalah arsip-arsip tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan tersebut. Informasi arsip statis yang disajikan melalui portal JIKN dapat dilihat pada lampiran.

Mayoritas keluhan pengguna JIKN yang masuk tahun 2010 berkisar pada masalah layanan arsip statis di ruang baca,

bukan tentang penggunaan JIKN. Perkembangan jumlah keluhan pengguna terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 8
PERBANDINGAN JUMLAH KELUHAN PENGGUNA JIKN
DARI TAHUN 2009 S.D 2010

NO	PENGGUNA	TAHUN		PERUBAHAN		%
		2009	2010	NAIK	TURUN	
1.	Mahasiswa, Peneliti dan Umum	4	8	4	0	50
JUMLAH		4	8	4	0	50

Sumber: Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, ANRI 2010

Pameran virtual melalui portal JIKN belum dimanfaatkan oleh anggota (simpul) jaringan, meskipun ANRI sebagai pusat jaringan nasional sudah menghimbau mereka untuk berpartisipasi aktif mengisi pameran virtual.

Pengisian khazanah informasi arsip statis melalui portal JIKN masih didominasi oleh ANRI yang telah memasukan sebanyak 110 inventaris Arsip Republik Indonesia dan 10 inventaris arsip Hindia Belanda sejak tahun 2006, namun belum maksimal dilakukan oleh arsip daerah provinsi dan arsip daerah kabupaten/kota sebagai anggota (simpul) jaringan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9
PERBANDINGAN JUMLAH INVENTARIS KHAZANAH
INFORMASI ARSIP STATIS MELALUI PORTAL JIKN
DARI TAHUN 2009 S.D 2010

NO	LEMBAGA KEARSIPAN	TAHUN/JUMLAH INVENTARIS		PERUBAHAN	
		2009	2010	NAIK	TURUN
1.	ANRI	-	22	22	-
2.	Prov. Jawa Tengah	4	14	10	-
3.	Prov. Sulawesi Selatan	2	-	-	-
4.	Prov. Kalimantan Barat	1	-	-	-
5.	Prov. Bengkulu	1	-	-	-
6.	Prov. Jawa Barat	-	-	-	-
7.	Kab. Merangin	1	3	1	2

NO	LEMBAGA KEARSIPAN	TAHUN/JUMLAH INVENTARIS		PERUBAHAN	
		2009	2010	NAIK	TURUN
8.	Prov. Sulawesi Tenggara	-	2	2	-
9.	Prov. Sumatera Barat	-	5	5	-
10.	Prov. Kalimantan Selatan	-	5	5	-
11.	Kab. Pati Prov. Jawa Tengah	-	1	1	-
JUMLAH		9	51	41	2

Sumber: Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, ANRI 2010

❖ **Diseminasi Informasi melalui Internet**

Adanya kemajuan teknologi mempunyai dampak terhadap segala bidang kehidupan, termasuk perkembangan teknologi dalam bidang informasi. Berdasarkan hal tersebut maka ANRI memfasilitasi masyarakat umum dalam mendapatkan informasi kearsipan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi ini. Dalam era globalisasi saat ini teknologi informasi sangat menentukan kecepatan dari arus informasi. ANRI dituntut untuk lebih kreatif dan produktif khususnya dalam menghasilkan suatu karya penyajian informasi kearsipan agar dapat bermanfaat untuk generasi penerus. Dalam rangka menyediakan bahan-bahan bukti pertanggungjawaban nasional dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi guna keperluan ilmiah, maka kedudukan ANRI sebagai pembina kearsipan secara nasional tentu perlu didukung oleh adanya penyajian informasi-informasi di bidang kearsipan yang selalu mutakhir, sehingga informasi kearsipan yang didapat lebih cepat, tepat dan baru. Langkah tersebut diwujudkan dalam kegiatan diseminasi informasi khazanah arsip statis ANRI melalui Internet www.anri.go.id. Tujuan dari diseminasi ini adalah untuk menyebarluaskan informasi khazanah arsip statis melalui Internet. Dengan sasaran terlaksananya diseminasi informasi khazanah arsip statis ANRI melalui Internet dengan tema tertentu yang disajikan pada setiap awal bulan.

Tema informasi arsip statis yang diseminasikan tahun 2010 adalah "Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Jilid 2".

Tabel 10
DISEMINASI INFORMASI MELALUI INTERNET
YANG DISESUAIKAN DENGAN TEMA
TAHUN 2010

NO	BULAN	JUDUL
1.	Januari	Negara Bangka
2.	Pebruari	Negara Banjar, Kalimantan Selatan
3.	Maret	Negara Indonesia Timur, Sulawesi Selatan
4.	April	131 Tahun RA Kartini
5.	Mei	Bali Bagian dari Negara Indonesia Timur
6.	Juni	Sulawesi Utara Bagian dari Negara Indonesia Timur
7.	Juli	Sulawesi Tengah bagian dari Negara Indonesia Timur
8.	Agustus	NTT bagian dari Negara Indonesia Timur
9.	September	NTB bagian dari Negara Indonesia Timur
10.	Oktober	Sulawesi Tenggara bagian Negara Indonesia Timur
11.	Nopember	Yogyakarta, dari NIS ke NIT
12.	Desember	Volkstraad-Dewan Perwakilan Rakyat-Hindia Belanda

Sumber: Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, ANRI 2010

❖ **Rakornas JIKN**

Salah satu sasaran pembangunan di bidang kearsipan adalah tersedianya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) antara ANRI dengan arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan nanti juga dengan arsip perguruan tinggi di seluruh Indonesia secara utuh pada skala nasional. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, perlu dilakukan kegiatan melalui forum rapat koordinasi secara nasional sebagai wahana untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program kerja implementasi JIKN.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, JIKN adalah sistem jaringan dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI. Fungsi JIKN sesuai dengan pasal 14 Undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan akses dan mutu

pelayanan kearsipan kepada masyarakat, kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat, dan peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan. Sejak tahun 2006, ANRI sebagai penyelenggara JIKN dan sebagai pusat jaringan nasional secara rutin menyelenggarakan rapat koordinasi tingkat nasional (Rakornas) dengan arsip daerah provinsi dan arsip daerah kabupaten/kota anggota (simpul) jaringan.

Maksud dan tujuan dari JIKN akan tercapai dengan baik apabila terjalin kerjasama dan adanya koordinasi antara pusat jaringan dengan para anggotanya. Koordinasi di antara institusi-institusi tersebut sangat penting dilakukan, tidak hanya insidental melainkan harus terus menerus dan intensif. Materi yang dikoordinasikan meliputi jumlah inventaris yang tersedia untuk publik, teknis penataan informasi arsip statis pada JIKN, pengoperasian metode penghimpun data, teknis *upload* informasi arsip statis pada JIKN juga tentang pemeliharaan aplikasi JIKN.

Koordinasi ini dilakukan melalui kegiatan Rakornas secara terus menerus dan intensif yang didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Pelaksanaan Rakornas dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan jumlah kantor arsip yang sudah dibentuk dan juga berkaitan dengan anggaran tersedia. Setiap kali penyelenggaraan Rakornas, jumlah peserta hanya dapat bertampung sekitar 100 orang lebih dari provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia. Jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia berjumlah 491 dan belum semuanya mempunyai kantor arsip.

2. Adanya perkembangan atau pemekaran wilayah seperti pembentukan provinsi atau kabupaten/kota yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
3. Adanya perkembangan dalam sistem JIKN itu sendiri yang mengikuti perkembangan aplikasi jaringan teknologi informasi secara nasional.
4. Adanya perkembangan perkembangan ilmu dalam dunia kearsipan.

Penyelenggaraan Rakornas JIKN pada tahun 2010 dilakukan dalam 2 (dua) tahap, Tahap I tidak dapat menghasilkan rekomendasi, karena materi yang dibahas adalah RPP SKN, SIKN, dan JIKN. Draft ini kemudian dikomunikasikan kembali pada Rakornas JIKN tahap II.

Sementara itu, tabel berikut ini menggambarkan perkembangan anggota (simpul) jaringan yang mengikuti Rakornas JIKN adalah sebagai berikut:

Tabel 11
PERBANDINGAN JUMLAH ANGGOTA JIKN
TAHUN 2009 DAN 2010

NO	INSTANSI	TAHUN		PERUBAHAN	
		2009	2010	NAIK	TURUN
1.	ANRI	23	7	-	15
2.	Arsip Daerah Provinsi	73	78	15	-
3.	Arsip Daerah Kabupaten/Kota	21	35	14	-
	JUMLAH	117	120	3	-

Sumber: Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, ANRI 2010

Rakornas JIKN tahun 2010 lebih mengutamakan peserta dari daerah, sehingga pada tahun 2010 jumlah peserta dari ANRI menurun bila dibandingkan dengan jumlah peserta tahun 2009, sedangkan untuk peserta daerah ada sedikit kenaikan, agar setiap anggota (simpul) jaringan dapat memberikan masukan-masukan dalam rangka melaksanakan

fungsi JIKN seperti yang telah ditentukan berkoordinasi dengan pusat jaringan nasional.

3.2.1.3 Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi yang sudah menerapkan SIKS-TIK

Sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan yang terdiri dari ANRI, Arsip Daerah Provinsi, Arsip Daerah Kabupaten/Kota dan Arsip Perguruan Tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional berupaya memberdayakan lembaga arsip daerah. Salah satu bentuk pemberdayaan lembaga kearsipan daerah dalam pengelolaan arsip statis adalah pemberian seperangkat komputer berikut Sistem Informasi Kearsipan Statis berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (SIKS-TIK) untuk diimplementasi arsip daerah provinsi. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan arsip statis di daerah sebagai memori kolektif daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Program ini dilaksanakan sejak tahun 2008 dan sampai dengan tahun 2009 telah diimplementasikan di 21 (dua puluh satu) provinsi. Sedangkan tahun 2010 telah dilaksanakan pada 12 (dua belas) provinsi yaitu: Lampung, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Sulawesi Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Banten.

3.2.1.4 Jumlah instansi pusat yang sudah menerapkan SIKD-TIK

Sebagai salah satu prioritas bidang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014, kegiatan implementasi sistem pengelolaan arsip dinamis berbasis teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dapat berjalan maksimal dengan hasil yang efektif dan optimal

dalam mendukung pencapaian kinerja manajemen lembaga aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung setiap instansi dalam pelaksanaan implementasi aplikasi sistem pengelolaan arsip berbasis teknologi dan komunikasi secara efektif, efisien dan terpadu, sehingga pengelolaan arsip dinamis yang dilakukan lembaga dapat berjalan sesuai dengan perkembangan teknologi, mudah diakses dan sesuai dengan peraturan perundangan dan standar kearsipan.

Pada tahun 2010 ANRI melaksanakan Program Pengelolaan Arsip Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung reformasi birokrasi dalam rangka ketatalaksanaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 10 (sepuluh) lembaga pemerintah pusat dan lembaga di bawahnya melalui kegiatan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). Dari target capaian tersebut telah dilaksanakan implementasi SIKD pada 10 (sepuluh) lembaga pemerintah pusat dan lembaga dibawahnya yaitu Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Erlangga Surabaya, Universitas Hasanudin Makassar, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, PT Pelindo IV Makassar, PT Telkom Indonesia Bandung, dan PT Pelindo III Surabaya.

Dalam rangka implementasi SIKD, dilaksanakan juga kegiatan Penjajakan Implementasi Aplikasi SIKD atas permintaan instansi terhadap kesediaan infrastruktur jaringan serta sarana pendukung lainnya sebagai prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 pada 2 (dua) BUMN di daerah dan 2 (dua) Universitas di Daerah yaitu: PT. Semen Padang Sumatera Barat, PT. Semen Gresik Jawa Timur, Universitas Pattimura Ambon dan Universitas Udayana Bali.

3.2.2. Mewujudkan Usaha-usaha Pembinaan Kearsipan secara nasional di lingkungan Lembaga Aparatur Negara

Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Jumlah lembaga/unit kearsipan dan arsiparis yang terakreditasi dan disertifikasi	6 lembaga/ unit kearsipan dan 40 arsiparis	6 lembaga/ unit kearsipan dan 40 arsiparis	100%
Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis	1 Pedoman	1 Pedoman	100%
Jumlah peserta bimbingan arsiparis dan tim penilai	4 Pusat 5 Daerah	4 Pusat 5 Daerah	100%
Jumlah provinsi yang mendapatkan kendaraan layanan masyarakat sadar arsip	14 Provinsi 2 Kab/Kota	14 Provinsi 2 Kab/Kota	100%
Jumlah Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan Kearsipan sesuai dengan NSPK Dinamis Bidang Kearsipan	19 Pusat 42 Daerah	19 Pusat 42 Daerah	100%
Jumlah instansi pusat dan daerah yang mendapatkan supervisi kearsipan	8 Pusat 8 Daerah	8 Pusat 8 Daerah	100%
Penyusunan Jadwal Retensi Arsip	25 JRA	25 JRA	100%
Penyelenggaraan Arsip Masuk Desa	22 Kabupaten/ Kelurahan	22 Kabupaten/ Kelurahan	100%
Pengembangan Pegawai	100 Pegawai	117 Pegawai	117%

3.2.2.1 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga/Unit Kearsipan yang di Akreditasi dan Sertifikasi

Untuk mengetahui apakah suatu instansi sudah melaksanakan pengelolaan arsipnya sesuai dengan standar kearsipan dilaksanakan akreditasi kearsipan sebagai bentuk penilaian terhadap instansi pengelola kearsipan. Kegiatan akreditasi yang dilaksanakan dibedakan kepada akreditasi sistem kearsipan elektronik, akreditasi lembaga dan unit kearsipan, dan akreditasi penyelenggaraan diklat kearsipan.

Pada Tahun 2010 telah dilaksanakan Akreditasi Lembaga Jasa Kearsipan pada: PT. Info Global Pratama, PT. Bina Kopentensia Pesona, PT. Mitra Data Sarana, PT. Multifiling Mitra Indonesia, PT. Indo Arsip, PT. Data Storage Services.

Sementara itu untuk mendukung penyelenggaraan kearsipan, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Untuk itu ANRI telah melaksanakan sertifikasi SDM Kearsipan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Juli 2010 bertempat di Jakarta yang diikuti peserta sebanyak 40 orang.

Disamping itu dilaksanakan kegiatan pemilihan arsiparis teladan tingkat nasional yang diikuti oleh 67 Arsiparis dengan rincian instansi pusat sebanyak 37 Arsiparis dan 30 pemerintah provinsi. Lingkup dari pemilihan arsiparis teladan meliputi: penilaian administrasi, penilaian pengetahuan (tes tulis, wawancara dan praktek, psikologi dan penilaian sikap). Berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor:HK.01/115/2010 tentang Pemenang Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional Tahun 2010 menetapkan bahwa Kementerian Kehutanan sebagai Juara I dan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur sebagai Juara II dan III.

3.2.2.2 Pedoman Mekanisme Kerja Arsiparis

Pelaksanaan kegiatan ini telah menghasilkan Kamus Peristilahan Kearsipan yang dapat menjadi acuan nasional guna memberikan standar peristilahan kearsipan yang baku dalam pelaksanaan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan serta Pedoman Mekanisme Kerja Arsiparis untuk memberikan arahan bagi Arsiparis dalam melaksanakan kegiatan kearsipan dan menjadi pendorong arsiparis untuk meningkatkan hasil kerja.

3.2.2.3 Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit atas usulan DUPAK bagi pejabat Arsiparis Madya golongan IV dari Lembaga Negara dan Badan Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya.

Realisasinya kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali periode penilaian dan penetapan angka kredit bagi Arsiparis Madya yaitu Angkatan I dilaksanakan pada bulan Juli-Desember 2009 berjumlah 39 orang Arsiparis Madya dan Angkatan II dilaksanakan pada bulan Januari-Juni 2010 berjumlah 37 orang Arsiparis Madya. Sedangkan Bimbingan Arsiparis, Tim Penilai dan Pemuktahiran Data Arsiparis di Kementerian Pekerjaan Umum, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Kementerian Perhubungan, Perpustakaan Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bali, dan Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan hasil dari kegiatan tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan arsiparis, tim penilai arsiparis dan Pembina kepegawaian tentang peraturan yang berhubungan dengan pembinaan jabatan fungsional arsiparis, tata cara penilaian dan pengembangan jabatan fungsional arsiparis.

Disamping itu, telah diselenggarakan sosialisasi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya yang bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan arsiparis dan sumber daya manusia kearsipan. Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 8 Juni 2010 dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang peserta yang merupakan perwakilan dari beberapa instansi pusat dan kabupaten/kota.

3.2.2.4 Layanan Masyarakat Sadar Arsip

Dalam rangka upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya arsip, ANRI telah memberikan sarana kepada pemerintah daerah yaitu berupa Mobil Unit Layanan Masyarakat Sadar Arsip, program ini dilaksanakan sejak tahun 2008.

Tahun anggaran 2010 telah diserahkan kepada 14 (empat belas) provinsi yaitu: Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Riau, Maluku, Papua Barat dan Sulawesi Barat. Dengan demikian sudah 33 provinsi dan 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Kupang telah memiliki Mobil Layanan Masyarakat Sadar Arsip. Mobil dimaksud setiap saat dapat dipergunakan untuk memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat dalam rangka penyebaran informasi melalui visualisasi arsip serta memberikan jasa perawatan dan perawatan terhadap arsip vital seperti ijazah, sertifikat dll.

3.2.2.5 Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah yang telah menyelenggarakan kearsipan dinamis sesuai dengan NSPK Bidang Kearsipan

Dalam rangka pembinaan kearsipan terhadap instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka ANRI memberikan bimbingan dan konsultasi kearsipan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kearsipan meliputi kesisteman, kelembagaan, SDM kearsipan diseluruh instansi pemerintah pusat dan daerah, sehingga dapat menerapkan sistem kearsipan sesuai dengan standar dan kaidah kearsipan, yang pada akhirnya arsip dapat diselamatkan.

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan pembinaan kearsipan agar dapat mengetahui tingkat keberhasilan atau kekurangan dalam pengelolaan arsip di masing-masing instansi sehingga memudahkan untuk dilakukan pembinaan selanjutnya secara nasional. Pada tahun 2010 telah dilakukan bimbingan konsultasi dan supervisi sebanyak 40 instansi yang terdiri dari 19 (sembilan belas) instansi pusat dan 21 (dua puluh satu) instansi daerah. Kegiatan bimbingan konsultasi dan supervisi pada instansi pusat

sebanyak 19 (sembilan belas) tersebut terdiri dari 11 (sebelas) instansi pusat, 2 (dua) BUMN, dan 1 (satu) Universitas dan Rumah Sakit yaitu: Kementerian PAN dan RB, BPKP, Kementerian Pertanian, LAN, BKPM, Komisi Nasional Perempuan, PT. Sarinah, Komisi Penyiaran Indonesia, PT. Dirgantara Indonesia Bandung, Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat, Konsil Kedokteran Indonesia. Kegiatan supervisi meliputi: Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, PT. Timah (Persero) Tbk. Pangkal Pinang, PT. Jasa Marga, Bank Bukopin, Kementerian Perdagangan, Rumah Sakit Kariyadi Semarang, Kementerian Luar Negeri, Badan Kepegawaian Nasional. Sedangkan Bimbingan konsultasi pada daerah sebanyak 42 (empat puluh dua) instansi daerah.

Disamping melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan, ANRI membantu instansi dan konsultasi penerapan sistem kearsipan sebanyak 59 kali/instansi.

Tabel 12
JUMLAH INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIBINA OLEH ANRI TAHUN 2009 DAN 2010

No	Instansi	Tahun		Perubahan		
		2009	2010	Naik	Turun	%
1.	Pusat	46	19		27	(-) 41,00
2.	Daerah	32	42	10	-	(+) 24,00
	JUMLAH	78	61	15	27	(+)23,81

Sumber : Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI, Tahun 2010.

Dari jumlah instansi pemerintah yang dibina oleh ANRI dapat diketahui jumlah instansi pemerintah yang sudah menerapkan sistem kearsipan. Perkembangan jumlah instansi yang sudah menerapkan sistem kearsipan sesuai dengan kaidah kearsipan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah instansi yang menerapkan sistem kearsipan merupakan indikasi meningkatnya perhatian instansi dalam melakukan pengelolaan

arsip. Sebagai perbandingan jumlah instansi yang sudah melakukan pengelolaan arsip pada tahun 2010 adalah sebanyak 97 instansi atau naik sebanyak 11 instansi atau 11,34 % dari tahun 2009 sebanyak 86 instansi. Sebagai ilustrasi perkembangan jumlah instansi yang melakukan pengelolaan arsip sesuai dengan kaidah kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 13
JUMLAH INSTANSI PUSAT DAN DAERAH
YANG TELAH MELAKUKAN PENGELOLAAN ARSIP
SESUAI DENGAN KAIDAH KEARSIPAN
DARI TAHUN 2009 S.D 2010

No	Instansi	Tahun		Perubahan		
		2009	2010	Naik	Turun	%
1.	Pusat	47	49	2	-	(+) 4,26
2.	Daerah	39	48	9	-	(+) 23,08
	JUMLAH	86	97	11		(+) 12,8

Sumber : Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI, 2010.

3.2.2.6 Bimbingan Konsultasi dan Supervisi Penerapan Sistem Kearsipan pada Lembaga Negara, Badan Pemerintah Pusat dan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan konsultasi penerapan sistem kearsipan pada lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah tingkat pusat sehingga pengelolaan arsip pada lembaga pemerintah tersebut dapat berjalan dengan sistematis dan tertib sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku. Sedangkan supervisi dilakukan untuk mengetahui apakah penyelenggaraan kearsipan pada instansi tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku.

Tahun 2010 telah melaksanakan bimbingan konsultasi dan supervisi dengan menyiapkan standar instrumen yang akan diberikan pada kegiatan bimbingan dan supervisi pada 19 instansi. Sedangkan supervisi kearsipan pada daerah sebanyak 10 (sepuluh)

Kabupaten/Kota yaitu 2 (dua) Kabupaten/Kota wilayah timur, 3 (tiga) kabupaten/kota wilayah tengah dan 5 (lima) kabupaten/kota.

3.1.2.7 Penyusutan Arsip Sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA)

Melalui kegiatan pembinaan kearsipan maka diperoleh pemahaman tentang pentingnya arsip, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah JRA pemerintah pusat dan daerah yang disusun dan telah mendapat persetujuan Kepala ANRI.

Pada tahun 2009 jumlah JRA yang dimintakan persetujuan Kepala ANRI adalah sebanyak 5 (lima) JRA instansi Pusat dan 18 JRA instansi daerah dan yang disetujui 5 (lima) JRA instansi Pusat dan 18 JRA instansi daerah. Sedangkan tahun 2010 jumlah JRA yang dimintakan persetujuan Kepala ANRI adalah sebanyak 25 JRA yang terdiri dari instansi Pusat, 13 (tiga belas) JRA instansi daerah dan yang disetujui adalah sebanyak 12 (dua belas) JRA instansi daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 14
JUMLAH INSTANSI YANG DI BERIKAN BIMBINGAN DAN KONSULTASI PENYUSUNAN JRA TAHUN 2010

NO	INSTANSI	USULAN JRA
1.	Kementerian BUMN	JRA Kepegawaian
2.	Otorita Batam	JRA Keuangan, Kepegawaian, Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian serta JRA Substantif
3.	Kementerian Koperasi dan UKM	JRA Kepegawaian
4.	Kementerian Keuangan RI	JRA Keuangan, Kepegawaian, Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian
5.	Kementerian Pendidikan Nasional	JRA Substantif
6.	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	JRA Fasilitatif Non Keuangan
7.	Arsip Nasional RI	JRA Substantif

NO	INSTANSI	USULAN JRA
8.	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	JRA Keuangan, Kepegawaian, Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian serta JRA Subtantif
9.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	JRA Keuangan, Kepegawaian, Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian serta JRA Subtantif
10.	Univesitas Sumatera Utara	JRA Keuangan, Kepegawaian, Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian serta JRA Subtantif
11.	Universitas Udayana	JRA Keuangan, Kepegawaian, Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian serta JRA Subtantif
12.	Universitas Sebelas Maret	JRA Keuangan, Kepegawaian, Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian serta JRA Subtantif
13.	Universitas Politeknik Negeri Bandung	JRA Keuangan, Kepegawaian, Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian serta JRA Subtantif
14.	Kabupaten Tidore Kepulauan	JRA Fasilitatif, Subtantif
15.	Kabupaten Ternate	JRA Fasilitatif, Subtantif
16.	Kabupaten Timor Tengah Utara	JRA Keuangan, Kepegawaian
17.	Provinsi Sulawesi Selatan	JRA Keuangan, Kepegawaian
18.	Kabupaten Gianyar	JRA Fasilitatif, Subtantif
19.	Kabupaten Sleman	JRA Keuangan
20.	Kabupaten Pandeglang	JRA Keuangan, Kepegawaian
21.	Kabupaten Cilegon	JRA Keuangan, Kepegawaian
22.	Provinsi Jawa Barat	JRA Keuangan, Kepegawaian
23.	Kabupaten Banyumas	JRA Keuangan, Kepegawaian
24.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	JRA Subtantif
25.	Kota Bekasi	JRA Keuangan, Kepegawaian

Sumber : Deputi Bidang Pembinaan ANRI Kearsipan, 2010.

Dari jumlah usulan persetujuan JRA tersebut diatas, JRA yang telah mendapatkan persetujuan Kepala ANRI tahun 2010 adalah 11 (sebelas) JRA yang terdiri dari 8 (delapan) JRA instansi pusat dan 3 (tiga) JRA instansi daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 15
JUMLAH INSTANSI YANG MENDAPAT PERSETUJUAN JADWAL
RETENSI ARSIP (JRA) TAHUN 2010

NO	INSTANSI	JENIS JRA YANG DISETUJUI
1.	Kepegawaian Kementerian BUMN	JRA Kepegawaian dengan Persetujuan Nomor: P.JRA/01/2010 tanggal 19 Pebruari 2010
2.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	JRA Kepegawaian dengan Persetujuan Nomor:P.JRA/03/2010 tanggal 29 Maret 2010
3.	Kementerian Keuangan RI	JRA Keuangan, Kepegawaian, Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian dengan Persetujuan Nomor: P.JRA/04/2010 tanggal 6 April 2010
4.	Kementerian Pendidikan Nasional RI	JRA Keuangan dan Kepegawaian dengan Persetujuan Nomor:P.JRA/07/2010 tanggal 9 November 2010
5.	Otorita Batam	JRA Keuangan, Kepegawaian, Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian serta JRA Substantif dengan Persetujuan Nomor: P.JRA/10/2010 tanggal 14 Desember 2010
6.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	JRA Keuangan, Kepegawaian, Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian serta JRA Substantif dengan Persetujuan Nomor: P.JRA/11/2010 tanggal 27 Desember 2010
7.	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	JRA Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian dengan Persetujuan Nomor: P.JRA/12/2010 tanggal 27 Desember 2010
8.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	JRA Keuangan, Kepegawaian, Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian serta JRA Substantif dengan Persetujuan Nomor:P.JRA/13/2010 tanggal 30 Desember 2010
9.	Kabupaten Demak	JRA Keuangan dan Kepegawaian
10.	Kota Surabaya	JRA Keuangan dan Kepegawaian
11.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	JRA Subtantif, Fasilitatif, Keuangan dan Kepegawaian

Sumber : Deputi Bidang Pembinaan Kearsipn ANRI, 2010.

Tabel 16
PERBANDINGAN JUMLAH USULAN JRA INSTANSI DAN
JUMLAH JRA INSTANSI YANG DISETUJUI KEPALA ANRI
PADA TAHUN 2009 DAN 2010

No	Instansi	Tahun 2009			Tahun 2010		
		Usulan	Disetujui	%	Usulan	Disetujui	%
1.	Pusat	8	5	62,5	13	8	61,53
2.	Daerah	29	18	62,1	12	3	25,00
	JUMLAH	37	23	62,2	25	11	44,00

Sumber : Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI, 2010.

Sebagai salah satu *quick win* program percepatan reformasi birokrasi, ANRI telah memberikan layanan persetujuan Jadwal Retensi Arsip melalui pemberian konsultasi JRA kepada instansi yang menjadi sasaran obyek, memfasilitasi pembahasan JRA dengan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan untuk persetujuan JRA keuangan yang akan diajukan ke ANRI. Rancangan JRA Keuangan tersebut adalah: a) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengenai JRA Keuangan; b) Kementerian Koperasi dan UKM mengenai JRA Keuangan; c) Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai JRA Lengkap; dan d) Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional mengenai JRA Lengkap.

3.1.2.8 Penyelenggaraan Arsip Masuk Desa

Desa merupakan ujung tombak dan garda terdepan dalam pelayanan terhadap masyarakat, di samping itu desa juga merupakan cikal bakal demokrasi di Indonesia dengan adanya Pemilihan Kepala Desa secara langsung. Salah satu wujud kepedulian ANRI untuk mengenalkan arsip kepada masyarakat pada tahun 2010 ANRI telah melaksanakan "Program Arsip Masuk Desa (AMD)" yang telah dicanangkan sebelumnya oleh Presiden. Dalam sejarah pemerintahan negara kita, pembinaan kearsipan pada tingkat pemerintahan desa belum tersentuh secara

komprehensif dan sistematis. Berkenaan dengan hal tersebut diharapkan pemerintahan desa dapat meningkatkan kinerja khususnya dalam pelaksanaan tugas penataan dan pengelolaan informasi arsip serta pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan ini dimaksud untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan di desa/kelurahan. Namun mengingat desa/kelurahan merupakan wilayah binaan Lembaga Kearsipan Daerah kabupaten/kota, maka bimbingan dan konsultasi Arsip Masuk Desa cukup dilakukan secara sampling. Dalam tahun 2010 ini ANRI hanya mampu melakukan bimbingan konsultasi untuk 22 kabupaten/kelurahan, yang setiap kabupaten/kelurahan rata-rata sekitar 2-6 desa/ kelurahan yang diberikan bimbingan konsultasi.

Tahun 2010 ANRI telah melaksanakan bimbingan pada Kabupaten Kupang, Jayapura, Manokwari, Ende, Maluku Tenggara, Halmahera Tengah, Kutai Kertangera, Pontianak, Gianyar, Lombok Barat, Bone, Kepulauan Seribu, Garut, Mojokerto, Gunung Kidul, Bintan, Sumedang, Kota Bandar Lampung.

3.1.2.9 Pengembangan SDM Kearsipan

a. Bantuan Beasiswa

Pengembangan SDM dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keahlian dan keterampilan antara lain guna mengembangkan profesionalisme baik dibidang kearsipan maupun bidang lainnya dengan melakukan pendidikan dan pelatihan pegawai, pemberian bantuan beasiswa. Pemberian bantuan beasiswa diharapkan dapat membantu pegawai ANRI untuk meningkatkan profesionalitas kompetensinya dengan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada Tahun 2010 ANRI menargetkan pemberian bantuan beasiswa kepada pegawai ANRI sebanyak 100 orang untuk jenjang S1/DIV sampai S3 baik dalam dan luar negeri.

Tahun 2010 capaian program bantuan beasiswa yang telah dilaksanakan melebihi dari target yang telah direncanakan yaitu sejumlah 117 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

- a. DIV Kearsipan di Universitas Terbuka sebanyak 35 orang;
- b. S1 di LAN dan Universitas lainnya sebanyak 19 orang;
- c. S2 Sejarah di Universitas Diponegoro sebanyak 15 orang;
- d. S2 di LAN dan Universitas lainnya sebanyak 43 orang;
- e. S3 di Universitas Indonesia dan Universitas Negeri Jakarta sebanyak 4 orang;
- f. S3 di Universitas Leiden sebanyak 1 orang.

b. Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri dan Luar Negeri

Untuk lebih meningkatkan SDM ANRI selain melalui pemberian beasiswa juga melalui pendidikan dan pelatihan baik dalam maupun luar negeri.

Tahun 2010 ANRI telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebanyak 212 orang dengan rincian: Kursus Bahasa Belanda sebanyak 30 orang, Kursus Bahasa Inggris sebanyak 30 orang, Kursus Bahasa Arab Melayu sebanyak 15 orang, Kursus Bahasa Jawa Kuno sebanyak 27 orang, Kursus Preservasi Arsip ANRI sebanyak 30 orang, Kursus Pemandu Diorama sebanyak 30 orang, dan Kursus Layanan Prima sebanyak 30 orang. Sedangkan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri, ANRI mengirimkan pegawai sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan rincian : Singapura, Cina, New Zealand dan Belanda.

c. Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan

1) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

ANRI telah melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan baik di pusat maupun daerah, salah satunya

melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan kearsipan. Diklat Fungsional Jabatan Arsiparis meliputi Diklat Keahlian, Keterampilan dengan jumlah peserta sebanyak 184 orang.

2) Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Dalam melaksanakan pembinaan SDM kearsipan telah dilaksanakan diklat teknis kearsipan baik di pusat sebanyak 1.858. orang.

Selain itu, agar terciptanya pembinaan nasional oleh ANRI guna terciptanya efisiensi dan efektifitas kinerja, ANRI telah mengalokasikan sebagian dana pembangunan kepada pemerintah provinsi dalam bentuk dana dekonsentrasi. Dalam melaksanakan pembinaan SDM kearsipan di daerah dapat dilaksanakan oleh masing-masing daerah dengan selalu menjaga sinergi kerja ANRI sebagai lembaga pembina kearsipan. ANRI telah mengalokasikan dana dekonsentrasi bidang kearsipan ke 32 (tiga puluh dua) Pemerintah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan bagi Sekretaris Desa dengan jumlah peserta sebanyak 1.280 orang.

3.1.3. Mewujudkan Usaha-usaha Penyelamatan dan Pelestarian Arsip/Dokumen Negara

Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Jumlah Penilaian yang ditindaklanjuti pengakuisisian dan pemusnahan arsip	25 Instansi	25 Instansi	100%
Jumlah daerah bencana arsip yang diselamatkan	6 Daerah	6 Daerah	100%
Jumlah daftar arsip pengolahan arsip konvensional	13 Daftar	4 Inventaris 18 Daftar	169%

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Jumlah Arsip Rusak yang direstorasi	3.300 lembar	3.300 lembar	100%
Jumlah Naskah Sumber Arsip yang diterbitkan	11 Naskah	11 Naskah	100%

3.1.3.1 Rekomendasi Penilaian yang ditindaklanjuti pengakuisisian dan pemusnahan arsip.

Penyelamatan dan pelestarian arsip sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional, memori kolektif dan jati diri bangsa melalui penelusuran, pendataan dan penarikan arsip instansi pemerintah/swasta/ormas/orpol/perorangan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, dengan tujuan memperkaya khasanah arsip yang tersimpan di ANRI sebagai memori kolektif bangsa, jati diri bangsa dan menjadi simpul pemersatu bangsa.

Prosedur yang dilaksanakan dalam penyelamatan arsip statis adalah melalui penilaian. Penilaian ini dilaksanakan untuk menyelamatkan arsip yang memiliki nilai pertanggungjawaban nasional dan sebagai akuntabilitas kinerja dari instansi yang perlu mendapat perhatian untuk dikategorikan sebagai arsip statis yang nantinya akan disimpan di ANRI. Hasil penilaian adalah berupa rekomendasi mengenai arsip yang harus diakuisisi atau diserahkan ke ANRI atau dimusnahkan.

Adapun penyelamatan dan pelestarian arsip dilakukan terhadap lembaga negara dan lembaga pemerintan pada masa orde lama, orde baru, reformasi dan Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di pusat maupun di daerah.

Kegiatan penilaian arsip pada tahun 2010 dilaksanakan sebanyak 15 instansi Pusat dalam rangka Penilaian dan Akuisisi Arsip Kabinet

Indonesia Bersatu, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Lembaga Administrasi Negara, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Agung, Sekretariat Jenderal DPR-RI, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat.

Sedangkan penyelamatan arsip Pemilu dilaksanakan pada KPU Pusat dan 7 (tujuh) KPU Provinsi yaitu KPU Provinsi Bengkulu, KPU Provinsi NAD, KPU Provinsi Kalimantan Tengah, KPU Provinsi Bangka Belitung, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Provinsi DIY, KPU Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan monitoring dan penyelamatan Arsip Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2009 sebanyak 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu: Kota Makassar, Kota Surabaya, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Sambas.

Disamping itu, penarikan arsip dilakukan pula terhadap perusahaan, ormas, orpol dan perorangan. Selama tahun 2010 terdapat 25 instansi yang menyerahkan arsipnya ke ANRI. Dengan perincian 16 instansi pusat dan 9 instansi daerah, terutama yang berkenaan dengan arsip Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Pada tahun 2009 terdapat 23 instansi yang telah menyerahkan arsipnya ke ANRI, dengan perincian 13 instansi pusat dan 10 Instansi daerah, yang berkenaan pula dengan arsip Pemilihan Legislatif dan Pemilu Pemilihan Presiden. Dengan mengacu pada data diatas, terjadi peningkatan jumlah instansi yang telah menyerahkan arsipnya.

Tabel 17
PERBANDINGAN JUMLAH INSTANSI YANG MENYERAHKAN
ARSIP STATIS KE ANRI
TAHUN 2009 DAN 2010

No	Instansi	Tahun		Perubahan		
		2009	2010	Naik	Turun	%
1.	Pusat	13	16	3	-	(+) 23,07
2.	Daerah	10	9	-	1	(-) 10,00
	JUMLAH	23	25	2	-	(+) 8,69

Sumber : Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, 2010.

Seiring dengan adanya kegiatan penyerahan arsip dilakukan pula pemusnahan arsip yang sudah tidak mempunyai nilai guna lagi. Pemusnahan arsip dilakukan selain untuk mengurangi volume arsip yang tersimpan di Unit Kearsipan, juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip.

Selama kurun waktu tahun 2010, terdapat 12 (dua belas) instansi yang telah melaksanakan pemusnahan arsip, bila dibandingkan dengan tahun 2009 terhadap 7 (tujuh) instansi yang telah melaksanakan kegiatan yang sama dengan demikian telah terjadi kenaikan sebanyak 5 (lima) instansi atau 71,42% dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 18
PERBANDINGAN JUMLAH INSTANSI
YANG MEMUSNAHKAN ARSIP
TAHUN 2009 DAN 2010

No	Instansi	Tahun		Perubahan		
		2009	2010	Naik	Turun	%
1.	Pusat	1	5	4	-	(+) 400
2.	Daerah	6	7	1	-	(+) 16,6
	JUMLAH	7	12	5		(+) 71,42

Sumber: Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, 2010.

3.1.3.2 Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Pasca Bencana

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ANRI bekerjasama dengan Badan/Kantor

Arsip Daerah telah melakukan upaya penyelamatan dan pelestarian terhadap arsip dari daerah-daerah yang terkena bencana.

Pada tahun 2010 penyelamatan dan Pelestarian Arsip Pasca Bencana arsip dilaksanakan sebanyak 6 (enam) daerah yaitu: Bekasi, Kerawang, Tasikmalaya, Garut (Jawa Barat), Padang (Sumatera Barat) Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), dan Bencana Letusan Gunung Merapi diwilayah DIY dan Jawa Tengah. Penyelamatan dan pelestarian arsip terhadap daerah yang terkena musibah bencana alam dan banjir merupakan suatu upaya menyelamatkan dan melestarikan arsip tersebut dari kerusakan fisik dan hilangnya informasi yang sangat berharga bagi kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

3.1.3.3 Meningkatkan Pengolahan Arsip untuk terwujudnya daftar arsip, inventarisasi arsip, dan guide.

Untuk memanfaatkan arsip yang tersimpan diperlukan sarana temu balik arsip yang mudah dimengerti oleh pengguna arsip sehingga mereka dapat memperoleh arsip yang dibutuhkan dengan cepat dan nyaman. Oleh karena itu ANRI terus berupaya untuk menyusun sarana temu balik arsip sebagai alat bantu bagi pengguna di ruang layanan arsip. Sarana temu balik merupakan hasil dari kegiatan pengolahan arsip. Dengan demikian ANRI terus berupaya melakukan kegiatan pengolahan arsip statis sehingga seluruh khasanah arsip yang tersimpan dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Jumlah Sarana Temu Balik yang dimiliki oleh ANRI sampai dengan tahun 2009 adalah sebanyak 254 Daftar/ Inventaris. Sedangkan tahun 2010, dari target yang direncanakan sebanyak 13 Inventaris/Daftar Arsip (*Finding Aids*) yang dihasilkan sebagai guide pencarian kembali arsip, telah diselesaikan sebanyak 22 (dua puluh dua) inventaris/daftar atau 169%. Seluruh sarana temu balik tersebut sudah bisa dimanfaatkan oleh pengguna arsip di layanan ruang baca.

Tabel 19
PERKEMBANGAN JUMLAH DAFTAR ARSIP/INVENTARIS YANG
DIMILIKI ANRI s.d TAHUN 2010

No	Jenis Arsip	s/d 2009	Tahun 2010	Jumlah
1.	Arsip VOC dan Hindia Belanda	83 Daftar/ Inventaris	4 Inventaris 1 Daftar	88 Daftar/ Inventaris
2.	Arsip Republik Indonesia	79 Daftar/ Inventaris	8 Daftar	87 Daftar/ Inventaris
3.	Arsip Media Baru	58 Daftar/ Inventaris	4 Daftar	62 Daftar/ Inventaris
4.	Arsip Kartografik dan Kearsitekturan	34 Daftar/ Inventaris	5 Daftar	38 Daftar/ Inventaris
	JUMLAH	254 Daftar/ Inventaris	22 Daftar	276 Daftar/ Inventaris

Sumber : Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, 2010.

3.1.3.4 Pelestarian dan Layanan Arsip Statis

ANRI menyimpan sejumlah besar arsip dalam berbagai media baik berupa arsip konvensional maupun arsip media baru. Untuk menjaga kondisi arsip tersebut diperlukan beberapa langkah seperti pemeliharaan dan perawatan arsip. Secara keseluruhan ANRI memiliki khasanah arsip statis yang berasal dari periode VOC (1602-1800), periode Hindia Belanda (1800-1948), Periode Inggris (1811-1816) dan Republik Indonesia (1945- sekarang). Sedangkan khasanah arsip ANRI berdasarkan tipe media dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20
JUMLAH KHASANAH ARSIP YANG TERSIMPAN
DI ANRI

NO	MEDIA	JUMLAH			
		2009	2010	%	SATUAN
1.	Tekstual	27.247	27.247	-	Meter linier
2.	Kartografik	99.794	99.794	-	sheets
3.	Film	70.060	70.060	-	reels
4.	Video	30.125	30.125	-	kaset
5.	Suara	37.349	37.349	-	Kaset/open reels
6.	Foto	1.663.000	1.663.000	-	sheets (negatives + prints)
7.	Microfilm	13.648	13.648	-	reels (negatives)

NO	MEDIA	JUMLAH			
		2009	2010	%	SATUAN
8.	Microfische	7.200	7.200	-	fisches
9.	Optical DIsc	427	427	-	Keping

Sumber: Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, 2010.

Untuk menjaga kondisi arsip tersebut, diperlukan pemeliharaan dan perawatan yang memadai seperti restorasi dan preservasi. Untuk memelihara arsip konvensional salah satunya dilakukan dengan cara fumigasi. Untuk arsip media baru yang berupa film, mikrofilm, video kaset dan karet rekaman suara yang masih mempunyai kondisi fisik yang baik, akan dilakukan perawatan atau restorasi untuk menjaga arsip dari kerusakan. Hal ini perlu dilakukan agar informasi maupun fisik arsip tetap terjaga kelestariannya secara permanen. Selain melaksanakan pemeliharaan dan perawatan ANRI juga melaksanakan restorasi atau perbaikan arsip yang sudah mulai mengalami kerusakan. Jumlah arsip yang direstorasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21
PERBANDINGAN RESTORASI ARSIP FILM/VIDEO
DAN ARSIP KONVENSIONAL
TAHUN 2009 DAN 2010

No	Jenis Arsip	Tahun		Perubahan	
		2009	2010	Σ	%
1.	Arsip Film	1.000 reel	1.663 reel	(+) 663	66,3
2.	Arsip Video	1.500 reel	4.500 reel	(+) 3.000	200
3.	Arsip Konvensional	15.000 Lembar	6.915 lembar	(+) 8.085	53,9

Sumber: Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, 2010

Dengan terjaga dan terpeliharanya kondisi fisik arsip di ANRI diharapkan para pengguna dapat memanfaatkan informasi yang terkandung didalamnya dengan nyaman sebab arsip yang sudah berumur ratusan tahun masih dapat dipergunakan tanpa menimbulkan bau dan bebas dari serangan perusak kertas.

Selain itu, untuk menjaga kondisi fisik arsip yang sudah terancam kerusakan maka arsip tersebut dialihmediakan sehingga pengguna arsip nantinya dapat mempergunakannya dalam kualitas yang lebih bagus. Sedangkan arsip yang asli tetap disimpan dan tidak dipergunakan lagi diruang layanan arsip, dengan demikian arsip tersebut dapat berumur lebih panjang lagi. Adapun perbandingan jumlah arsip yang dialihmediakan pada Tahun 2009 dan 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 22
PERBANDINGAN JUMLAH ARSIP YANG DIALIHMEDEKAKAN
TAHUN 2009 DAN TAHUN 2010

No	Jenis Arsip	Tahun		Jumlah
		2009	2010	
1.	Alih Media ke format digital video	500 reel	500 reel	1.000 reel
2.	Alih Media Arsip ke Video (dari video ke video)	50 Kaset	50 Kaset	100 Kaset
3.	Alih Media Foto ke Digital	2.500 Lembar	2.500 Lembar	5.000 Lembar
4	Alih Media Mikrofilm Positif	500 Roll	500 Roll	1.000 Roll

Sumber : Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, 2010.

Ujung dari rangkaian kegiatan konservasi/pelestarian arsip statis mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan perawatan adalah penggunaan dan pemanfaatan arsip melalui ruang layanan arsip. Salah satu bentuk layanan yang diberikan adalah layanan peminjaman arsip baik konvensional maupun media baru dan reproduksi arsip.

Jumlah pengguna arsip dapat dilihat dari jumlah pengunjung yang memanfaatkan arsip di ruang layanan arsip. Jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan arsip pada tahun 2009 sebanyak 2.668 orang, sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 3.093 orang, dengan demikian telah terjadi peningkatan sebanyak 425 orang atau 15,93%. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 23
PERBANDINGAN JUMLAH PENGUNJUNG
TAHUN 2009 DAN 2010

No	Asal Pengunjung	Jumlah Pengunjung		Jumlah Pengunjung		
		Tahun 2009	Tahun 2010	Naik	Turun	%
1.	Dalam Negeri	2.437 Orang	2.771 Orang	334	-	(+) 13,70
2.	Luar Negeri	231 Orang	322 Orang	91	-	(+) 39,39
	JUMLAH	2.668 Orang	3.093 Orang	425	-	(+) 15,93

Sumber : Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, 2010.

Bentuk pelayanan yang diberikan kepada pengunjung ruang layanan arsip antara lain adalah pelayanan peminjaman/ penggunaan arsip baik arsip tekstual maupun arsip format khusus. Tahun 2009 jumlah arsip yang dimanfaatkan oleh pengguna adalah sebanyak 20.643 nomor/berkas yang terdiri atas 8.659 nomor arsip tekstual dan 11.984 nomor arsip media baru. Sedangkan pada tahun 2010 jumlah arsip yang dimanfaatkan oleh pengguna adalah sebanyak 21.449 nomor/berkas yang terdiri atas 10.416 nomor arsip tekstual dan 11.033 nomor arsip media baru. Hal ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2009. Sebagai perbandingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 24
PERBANDINGAN JUMLAH ARSIP TEKSTUAL
YANG DIMANFAATKAN OLEH PENGGUNA
TAHUN 2009 DAN 2010

No	Jenis Arsip	Jumlah Yang Dimanfaatkan		Perubahan		
		Tahun 2009	Tahun 2010	Naik	Turun	%
1.	Hindia Belanda dan VOC	4.121 Nomor	4.161 Nomor	40	-	(+) 0,97
2.	Republik Indonesia	3.869 Nomor	5.590 Nomor	1.722	-	(+) 44,50
3.	Arsip Peta	669 Nomor	665 Nomor	-	4	(-) 0,59
	JUMLAH	8.659 Nomor	10.416 Nomor	1.757	-	(+) 20,29

Sumber : Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, 2010.

Tabel 25
PERBANDINGAN JUMLAH ARSIP FORMAT KHUSUS YANG
DIMANFAATKAN OLEH PENGGUNA TAHUN 2009 DAN 2010

No	Jenis Arsip	Jumlah Yang Dipinjam		Perubahan		
		Tahun 2009	Tahun 2010	Naik	Turun	%
1.	Film/Video	665 reel	933 reel	268	-	(+) 40,30
2.	Microfilm	4.167 roll	2.031 roll	-	2.136	(-) 51,52
3.	Foto	6.467 Nomor	7.274 Nomor	807	-	(+) 12,47
4.	Kartografi	619 Nomor	669 Nomor	50	-	(+) 8,07
5.	Kaset	66 Buah	126 Buah	60	-	(+) 90,90
	JUMLAH	11.984 Nomor	11.033 Nomor	-	591	(-) 7,93

Sumber : Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, 2010.

3.1.3.5 Penyusunan, Penerbitan, Diseminasi Naskah Sumber Arsip

Salah satu bentuk pemanfaatan khasanah arsip yang dimiliki ANRI adalah melalui penerbitan naskah sumber arsip. Tahun 2010 ANRI mempunyai target untuk menerbitkan 9 (sembilan) naskah sumber arsip sebagai berikut:

a. Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip Citra Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan dan penerbitan Naskah Sumber Arsip Citra Daerah merupakan kelanjutan kegiatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2004. Arsip Citra Daerah adalah suatu citra yang menggambarkan perjalanan sejarah suatu daerah provinsi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari NKRI berdasarkan arsip-arsip yang tersimpan di ANRI. Sampai dengan tahun 2009, Arsip Citra Daerah telah diterbitkan dan diberikan kepada 33 provinsi dan pada tahun 2010 citra daerah mulai dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota terpilih.

Penyusunan Arsip Citra Daerah pada tahun ini dilaksanakan pada 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu: Kota Ternate, Kota Bandung; Kabupaten Bogor; dan Kota Surabaya.

Citra Daerah mencakup arsip yang berupa teks, peta, foto dan film sebagai satu kesatuan. Didalamnya akan tampak sebuah dinamika

kolektif menuju pembentukan bangsa dan negara Indonesia. Sebuah perjuangan kolektif yang terbentuk atas dasar kesadaran sejarah. Pengalaman sejarah suatu bangsa adalah riwayat hidup bangsa itu sendiri. Apapun yang dialami, duka, nestapa, darah, nyawa, dan pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan serta membangun bangsa dan negara yang dicita-citakan bersama, terekam dalam arsip, yang merupakan memori kolektif bangsa, dan jati diri bangsa serta warisan nasional, arsip tersebut menurut undang-undang kearsipan disebut statis. Dengan mencermati lembar demi lembar arsip yang disajikan dalam Citra Daerah ini, akan diperoleh gambaran tentang dinamika berbangsa dan bernegara.

b. Penerbitan Naskah Sumber Arsip Citra Nusantara Jilid V

Citra Nusantara berisi tentang gambaran sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang mengungkapkan kembali nilai-nilai kejuangan dari berbagai aspek kehidupan yang terekam dalam khazanah arsip statis baik yang berada di ANRI, maupun di lembaga kearsipan provinsi dan kabupaten/kota.

Citra Nusantara diharapkan dapat mengungkap kembali semangat patriotisme dan nasionalisme di bumi Nusantara dengan prestasi bangsa yang terdapat dalam khazanah arsip menuju otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sasaran Citra Nusantara adalah mempertahankan NKRI melalui pemberdayaan arsip yang menggambarkan nilai-nilai kejuangan seluruh komponen bangsa.

Penelusuran bahan-bahan Citra Nusantara dilaksanakan di ANRI dan daerah provinsi, kabupaten/kota yang disusun dalam 5 judul, dan pada tahun 2010 ini telah dilaksanakan penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip citra nusantara dengan judul

"Demokrasi dan Mengatur Diri". Sedangkan 4 judul yang lain sudah diselesaikan sampai dengan tahun 2009 adalah "Jilid I: Tradisi Menjaga Keutuhan Negeri", "Jilid II: Tradisi Niaga Bangsa", "Jilid III: Tradisi Membina Negeri", "Jilid IV: Membangun Komunikasi".

c. Penerbitan Naskah Sumber Arsip Seri Arsip Citra Daerah Provinsi

Pada tahun 2010 telah dilaksanakan Penerbitan ulang Naskah Arsip Seri Citra Daerah sebanyak 5 naskah yaitu "Bangka Belitung dalam Arsip", "Papua Barat dalam Arsip", "Sulawesi Barat dalam Arsip", "Bengkulu dalam Arsip" dan "Sumatera Selatan dalam Arsip".

Selain itu ANRI juga telah menyelenggarakan pameran beberapa kali antara lain Pameran Wawasan Kebangsaan sebanyak 4 (empat) kali di Provinsi (Arsip Kota Ternate" di Maluku Utara; "Bengkulu Tempo Doeloe" bekerjasama dengan Arsip Nasional Singapura dan Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu di Bengkulu; Pameran dalam rangka Pertemuan para Menteri Perumahan se Asia-Pasifik bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Pemerintah Daerah Surakarta di Solo; Pameran dalam rangka kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan Museum Negeri Medan di Medan; Dalam rangka memperingati 100 Tahun Kota Bandung bekerjasama dengan Paris van Java di Bandung; "Ibu Tien Soeharto Dalam Kenangan" bekerjasama dengan Museum Purnabhakti Pertiwi, serta Pameran Arsip "Refleksi 65 Tahun Kemerdekaan RI" Kegiatan Pameran Arsip "Membangun Karakter Bangsa melalui Pendidikan" di ANRI.

3.3. CAPAIAN SASARAN PENUNJANG

Untuk mendukung percepatan pencapaian ketiga sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan sasaran pendukung yaitu Mewujudkan Koordinasi dalam Perencanaan,

Pembinaan, Pengendalian Program, Administrasi dan Sumber Daya dilingkungan ANRI secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang kinerja ANRI.

Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Jumlah Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang disusun	4 PP, 1 Inpres, dan 1 Perka ANRI	4 PP, 1 Inpres, dan 1 Perka ANRI	100%
Jumlah Jumlah naskah kerjasama yang dihasilkan	15 Naskah	15 Naskah	100%
Jumlah Jumlah sosialisasi diorama sejarah perjalanan bangsa	3 Kali talkshow di TV dan Radio, 3 buah iklan di 2 stasiun TV dengan 100 tayangan, 3 buah iklan di 3 stasiun radio dengan 100 tayangan	3 Kali talkshow di TV dan Radio, 3 buah iklan di 2 stasiun TV dengan 100 tayangan, 3 buah iklan di 3 stasiun radio dengan 100 tayangan	100%
Jumlah pengelolaan administrasi keuangan yang baik dan tepat waktu	1 Paket	1 Paket	100%
Jumlah jumlah perusahaan dan instansi pemerintah yang menggunakan jasa kearsipan	8 Instansi	8 Instansi	100%

3.3.1 Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

- a. Penyusunan RPP peraturan pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 menyangkut substansi tentang Sistem Kearsipan Nasional (SKN), Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN), dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN); Pengelolaan Arsip Dinamis; Pengelolaan Arsip Statis; serta Kedudukan Hukum dan Kewenangan Arsiparis. Hasil yang dicapai dalam kegiatan penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 sampai tahun 2010 ini adalah (1) rumusan konsepsi RPP tentang substansi SKN, SIKN, dan JIKN; Pengelolaan Arsip Dinamis; Pengelolaan Arsip Statis, serta Kedudukan Hukum dan Kewenangan Arsiparis/SDM Kearsipan, serta (2) sudah diselesaikan pemantapan dan pembulatan konsepsi oleh tim internal

ANRI dan telah dibahas dengan tim ahli eksternal ANRI serta dikonsultasikan dengan Sekretaris Negara dan Kementerian Hukum dan HAM dan selanjutnya dibahas inter kementerian sambil menunggu Surat Ijin Prakarsa Presiden.

- b. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Dalam rangka mempercepat pemahaman substansi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang telah disahkan pada tanggal 23 Oktober 2009, menyelenggarakan sosialisasi pada lingkungan pemerintah daerah, pusat, BUMN, BUMD dan Perguruan Tinggi.

3.3.2 Kerja sama dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri

Kerjasama kearsipan dilakukan sebagai upaya menjalin hubungan antar lembaga dalam dan luar negeri. Kerja sama dalam negeri dengan instansi pusat dilaksanakan dalam rangka penertiban pengelolaan kearsipan dinamis yang bertujuan untuk percepatan reformasi birokrasi terutama di bidang ketatalaksanaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kerja sama dengan luar negeri pada dasarnya pemanfaatan kegiatan tersebut untuk kepentingan dan keuntungan Pemerintah Republik Indonesia, baik untuk pengembangan sistem pengelolaan arsip, memperkaya khasanah arsip maupun peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan melalui pendidikan dan pelatihan dan pertukaran dan pengembangan SDM.

a. Kerja Sama Dalam Negeri

I. Instansi Pemerintah :

- a) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Arsip Nasional Republik tentang Program Pengembangan Penyelenggaraan Kearsipan.
- b) Kesepahaman Bersama antara Dewan Perwakilan Daerah RI dengan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Penyelamatan Arsip Negara dan Pembinaan Kearsipan.

- c) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional tentang Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- d) Pemerintah Provinsi Riau tentang Program Penyelenggaraan Kearsipan dalam Kerangka Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.
- e) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional tentang Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- f) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pengelolaan Arsip Dinamis, Penyelamatan Arsip Statis di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- g) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Kesepahaman Bersama antara ANRI dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

II. Perguruan Tinggi

- a) Universitas Diponegoro (Jawa Tengah)
Tindak lanjut kerjasama dengan UNDIP ANRI telah mengirim pegawai sebanyak 15 (lima belas) orang untuk mengikuti pendidikan S2 Sejarah di UNDIP.
- b) Universitas STIA-LAN
Kerjasama dengan STIA LAN tentang Penyelenggaraan Program Sarjana dan Pascasarjana dengan Konsentrasi Bidang Kearsipan.
- c) Universitas Terbuka
Tindak lanjut kerjasama dengan Universitas Terbuka, ANRI mengirim pegawai sebanyak 35 orang untuk mengikuti D-IV Kearsipan.
- d) Tahun 2010, sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ANRI telah merancang

perjanjian kerja sama dalam rangka pembentukan arsip perguruan tinggi pada 5 (lima) perguruan tinggi yaitu: Universitas Padjajaran (Jawa Barat), Universitas Hasanuddin (Sulawesi Selatan); Universitas Udayana (Bali); Universitas Sebelas Maret (Jawa Tengah); dan Institut Pertanian Bogor (Jawa Barat).

b. Kerja Sama Luar Negeri meliputi:

1. The National Archives of the Republic of Suriname

Kerja sama ANRI dengan Arsip Nasional Suriname diimplementasikan melalui kerja sama wawancara sejarah lisan kepada 42 orang keturunan Suriname yang kembali ke Indonesia. Kegiatan pertukaran arsiparis dan konservator yang semula akan dilaksanakan tahun 2010 ditunda pelaksanaannya pada tahun 2011.

2. Belanda

1). The Leiden University of The Kingdom of the Netherlands

Kerja sama ANRI dengan Universitas Leiden diimplementasikan melalui pengiriman pegawai ANRI untuk melaksanakan program studi S2 sebanyak 4 (empat) orang dan program S3 sebanyak 1 (satu) orang.

2). National Archives of Netherlands

Penandatanganan working progame sebagai tindak lanjut dari protokol kerjasama dengan Arsip Nasional Belanda dengan implementasi melalui pertukaran arsip, bantuan digitalisasi, Pengembangan SDM, Pertukaran Tenaga Ahli Bidang kearsipan, akan dilakukan *the courts foundation* dengan ruang lingkup digitalisasi arsip VOC mengenai *daag register resolutie*.

3). Singapura

1. National Heritage Board of the Republic of Singapore

Kerja sama ANRI dengan National Heritage Board of the Republic of Singapore diimplementasikan melalui

pelaksanaan pameran bersama khasanah arsip *Bencoolen* di Bengkulu.

2. National Archives of Singapore (NAS)

Kerja sama ANRI dengan Arsip Nasional Singapura diimplementasikan melalui pelaksanaan training Sertifikat ISO di ANRI dengan jumlah peserta sebanyak 27 orang.

- 4). Tahun 2010 ANRI telah menjajaki kerjasama kearsipan dengan "the State Archives Administrations of the People's Republic of China".

3.3.3 Sosialisasi Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa

Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa ini, pada hakekatnya adalah ungkapan bukti bahwa "Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa". Diorama ini juga bertujuan mensosialisasikan dan sekaligus memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kecintaan anak bangsa terhadap Tanah Air serta menumbuhkan ikatan emosional terhadap NKRI sejak usia dini. Kesadaran untuk menghargai nilai-nilai perjuangan bangsa ini divisualisasikan dalam bentuk Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa, yang merupakan mozaik dari rangkaian peristiwa sejarah yang ditampilkan melalui perpaduan seni dan teknologi.

Visualisasi sejarah perjalanan bangsa yang dapat disaksikan di dalam diorama ini, bukanlah benda tanpa makna, namun merupakan simpul pemersatu bangsa, yang mempersatukan keanekaragaman etnis, budaya, agama, dan kearifan lokal dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diorama bertujuan sebagai wahana pembelajaran sejarah bagi pelajar dari tingkat TK sampai dengan mahasiswa serta masyarakat umum. Jumlah pengunjung Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa sebanyak 10.598 orang dengan rincian:

Tabel 26
JUMLAH KUNJUNGAN DIORAMA SEJARAH PERJALANAN BANGSA
TAHUN 2010

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Taman Kanak-Kanak	121 orang
2.	Sekolah Dasar	1.844 orang
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	1.728 orang
4.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	2.782 orang
5.	Mahasiswa	1.144 orang
6.	Instansi Pemerintah	1.688 orang
7.	Instansi Swasta	105 orang
8.	Masyarakat Umum	1.186 orang
	JUMLAH	10.598 orang

Sumber : Sekretariat Utama ANRI, 2010.

Disamping itu dalam rangka lebih memperkenalkan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa kepada masyarakat umum, telah dilaksanakan sosialisasi di media massa dan elektronik antara lain melalui Talkshow di TVRI sebanyak 3 (tiga) kali, RCTI sebanyak 1 (satu) kali, Wawancara di Metro TV sebanyak 2 (dua) kali dan B Channel TV sebanyak 1 (satu) kali, Inter Aktif di Radio Elsinta sebanyak 1 (satu) kali, Advetorial pada Majalah Tempo, Penyiaran Iklan di TVRI dan Radio Elsinta masing-masing sebanyak 60 kali, TV Bandara Soekarno Hatta dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan September s/d November 2010 dengan rincian 5 (lima) kali siaran dalam 1 (satu) hari, ditambah dengan running teks, pemuktahiran iklan di Direktori Kepegawaian Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN).

3.3.4 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja secara tepat waktu

Dari perspektif keuangan Kinerja ANRI dinilai berdasarkan Laporan Keuangan yang disusun dan disampaikan kepada instansi terkait. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan ANRI Tahun 2009, BPK menyatakan bahwa Laporan Keuangan ANRI telah menyajikan secara "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" dalam semua hal yang material, posisi keuangan ANRI per 31 Desember 2009 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ANRI telah

mencapai kinerja yang terbaik dalam bidang keuangan. Namun hal ini tidak dibarengi dengan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah secara keseluruhan, dimana ANRI masih memperoleh penilaian yang kurang mengembirakan dari kementerian PAN dalam hal pelaksanaan SAKIP. Untuk itu, ANRI terus berupaya untuk meningkatkan implementasi SAKIP yang antara lain diwujudkan dengan ditetapkannya Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014, Indikator Kinerja Utama (IKU) ANRI, Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran ANRI, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang ANRI Tahun 2005 s.d 2025 dan upaya perbaikan yang dilakukan, ANRI telah mengalami peningkatan akuntabilitas yang ditunjukkan dengan naiknya nilai evaluasi LAKIP dari penilaian tahun 2008 sebesar 37,07 menjadi 50,22 pada tahun 2009.

3.3.5 Meningkatnya Jumlah Perusahaan yang menggunakan Jasa Kearsipan

- a. Penyimpanan Arsip
Tahun 2010 jumlah instansi yang memanfaatkan jasa penyimpanan arsip di ANRI adalah sebanyak 4 (empat) instansi yaitu Kementerian Luar Negeri RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PT. Bank DKI.
- b. Jasa Penataan Arsip/Dokumen
Pada tahun 2010 jumlah pengguna jasa penataan dilingkungan Penataan Arsip Biro Keuangan Biro Pusat Statistik (BPS), PT. Angkasa Pura I yang dilaksanakan secara bertahap. Hal ini mengindikasikan meningkatnya kesadaran perusahaan sehingga perlu dilakukan penataan arsip.
- c. Jasa Pengelolaan Arsip/Dokumen Secara Terpadu
Tahun 2010 jasa pengelolaan arsip/dokumen secara terpadu dilaksanakan pada Pengelolaan Arsip/Dokumen PT Angkasa Pura Bandara Udara Surabaya dan Denpasar; PT. Angkasa Pura Bandara Udara Sepinggan Balikpapan; PT. Angkasa Pura Bandara Udara Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan; PTPN III.

d. Jasa Perawatan Arsip

Layanan Jasa yang paling banyak dimanfaatkan oleh perusahaan/instansi adalah jasa penataan arsip/dokumen. Karena dengan tertatanya fisik arsip/dokumen dan tersedianya Daftar Arsip/Dokumen akan sangat mendukung kecepatan penemuan kembali arsip/dokumen yang kesemuanya untuk mendukung kinerja perusahaan. Tahun 2010 telah melaksanakan perawatan arsip PT. Bank Jabar Banten, Penataan Arsip/Dokumen PTPN III.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.4.1 ANGGARAN BELANJA ANRI TAHUN 2010

Anggaran belanja ANRI untuk tahun 2010 sebesar Rp.114.037.904.000,- (*seratus empat belas milyar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah*) yang terdiri dari anggaran satuan kerja ANRI sebesar Rp.110.737.904.000,- (*seratus sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah*) dan anggaran satuan kerja Dekonsentrasi sebesar Rp.3.300.000.000,- (*tiga milyar tiga ratus juta rupiah*).

Dari pagu anggaran satuan kerja ANRI sebesar Rp.110.737.904.000,- (*Seratus sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah*), terdiri dari Anggaran Rupiah Murni sebesar Rp.101.262.796.000,- (*seratus satu milyar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) dan pagu anggaran PNBPNP Rp.9.475.108.000,- (*sembilan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan ribu rupiah*).

Lebih jelasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ANRI secara keseluruhan berdasarkan alokasi program dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 27
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ANRI TAHUN 2010

NO.	PAGU	JUMLAH ANGGARAN (Rp).
1.	ANRI	110.737.904.000,-
2.	Dekonsentrasi (32 Provinsi)	3.300.000.000,-
	JUMLAH	115.040.639.000,-

Sumber : Biro Perencanaan ANRI, Tahun 2010.

Tabel 28
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
ANRI BERDASARKAN PROGRAM
TAHUN 2010

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	41.160.496.000
2.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	13.789.200.000
3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	6.877.500.000
4.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	27.851.908.000
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	21.058.800.000
	Jumlah	110.737.904.000

Sumber : Biro Perencanaan ANRI, Tahun 2010.

Ket : *) Termasuk anggaran dana dekonsentrasi

3.4.2 REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan secara lebih lengkap disusun tersendiri dan disampaikan kepada Menteri Keuangan RI berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Secara umum realisasi keuangan dari keseluruhan anggaran ANRI Tahun 2010, adalah sebesar Rp.101.354.052.740,- (*seratus satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*) atau 91,53% dari anggaran yang tersedia **Rp.110.737.904.000,-** (*seratus sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah*).

Sedangkan realisasi penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 29
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
BERDASARKAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2010

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Mewujudkan pengelolaan arsip yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) di lingkungan lembaga aparatur negara	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	1 Presentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK	1.514.372.000	1.398.250.880	92,33
			2 Jumlah Basis Data Penyelenggaraan JIKN	181.874.000	178.295.950	98,03
			3 Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang sudah menerapkan SIKS-TIK	905.400.000	857.158.400	96,65
			4 Jumlah instansi pusat yang sudah menerapkan SIKD-TIK	750.000.000	722.347.950	96,31
2	Mewujudkan usaha-usaha pembinaan kearsipan secara nasional di lingkungan lembaga aparatur negara		1 Jumlah lembaga/unit kearsipan dan arsiparis yang terakreditasi dan disertifikasi	195.000.000	185.258.400	95,00
			2. Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis	49.516.000	46.551.650	94,01
			3. Jumlah peserta bimbingan arsiparis dan tim penilai	1.138.646.000	1.100.070.250	96,61
			4. Jumlah provinsi yang mendapatkan kendaraan layanan masyarakat sadar arsip	1.332.600.000	1.319.576.562	99,02
			5. Jumlah Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan Kearsipan sesuai dengan NSPK Dinamis Bidang Kearsipan	497.760.000	489.937.925	98,43
			6. Jumlah instansi pusat dan daerah yang mendapatkan supervisi kearsipan	372.080.000	356.169.700	95,72
			7. Penyusunan Jadwal Retensi Arsip	109.455.000	97.290.000	88,88
			8. Penyelenggaraan Arsip Masuk Desa	905.400.000	875.158.400	96,65
			9. Pengembangan Pegawai	1.530.000.000	1.349.555.000	98,21

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
3	Mewujudkan usaha penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen negara	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	1. Jumlah rekomendasi penilaian yang ditindaklanjuti pengakuisisian dan pemusnahan arsip	349.309.000	348.714.000	99,83
			2. Jumlah daerah bencana arsip yang diselamatkan	500.400.000	499.068.700	99,73
			3. Jumlah daftar arsip pengolahan arsip konvensional	828.263.000	827.503.850	99,91
			4. Jumlah Arsip Rusak yang direstorasi	1.159.451.000	1.158.831.100	99,01
			5. Jumlah Penerbitan Naskah Sumber Arsip yang terbitkan	1.579.499.000	1.526.117.550	96,62

3.4.3 ANALISIS EFISIENSI

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan indikator output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks Efisiensi diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}
 SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\
 &= \frac{100\%}{100\%}
 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada tahun 2010, dari 18 kegiatan utama ANRI, seluruh kegiatan dinyatakan efisien, dengan tingkat efisiensi yang bervariasi antara (0,0) hingga (0,69). Dalam hal ini, semakin tinggi nilai tingkat efisiensi maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Dalam laporan ini perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input, yang hanya berupa dana. Diharapkan pada waktu yang akan datang pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih

memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2010 ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang **Percepatan Pemberantasan Korupsi** dalam rangka memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LAKIP sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini menyajikan capaian kinerja ANRI selama tahun 2010. Capaian kinerja (*performance results*) ANRI Tahun 2010 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) dan rencana kegiatan sebagai tolok ukur keberhasilan ANRI dalam tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kearsipan. Penetapan kinerja disusun berdasarkan sasaran strategis yang telah tertuang dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis ANRI Tahun 2010-2014. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

LAKIP ANRI Tahun 2010 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, di bidang Kearsipan secara Nasional. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas ANRI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*).

Sangat disadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ANRI Tahun 2010 ini belum sempurna. Sehubungan dengan itu masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan AKIP dan LAKIP sangat diharapkan sehingga AKIP ANRI untuk tahun-tahun selanjutnya akan menjadi lebih baik.

LAMPIRAN

FORMULIR PPS

LAMPIRAN 1.

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010**

NO	SASARAN					KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	CAPAIAN (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Mewujudkan pengelolaan arsip yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) di lingkungan lembaga aparatur negara	Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK	8 Hasil Kajian	8 Hasil Kajian	100%	
		Jumlah Basis Data Penyelenggaraan JIKN	1 Paket Basis Data	1 Paket Basis Data	100%	
		Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi yang sudah menerapkan SIKS-TIK	12 Provinsi	12 Provinsi	100%	
		Jumlah instansi pusat yang sudah menerapkan SIKD-TIK	10 instansi	10 instansi	100%	
2.	Mewujudkan usaha-usaha pembinaan kearsipan secara nasional di lingkungan lembaga aparatur negara	Jumlah lembaga/unit kearsipan dan arsiparis yang terakreditasi dan disertifikasi	6 lembaga/unit kearsipan dan 40 arsiparis	6 lembaga/unit kearsipan dan 40 arsiparis	100%	
		Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis	1 Pedoman	1 Pedoman	100%	
		Jumlah peserta bimbingan arsiparis dan tim penilai	4 Pusat 5 Daerah	4 Pusat 5 Daerah	100%	
		Jumlah provinsi yang mendapatkan kendaraan layanan masyarakat sadar arsip	14 Provinsi 2 Kab/Kota	14 Provinsi 2 Kab/Kota	100%	
		Jumlah Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan	11 Pusat 18 Daerah	11 Pusat 18 Daerah	100%	

NO	SASARAN					KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	CAPAIAN (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Kearsipan sesuai dengan NSPK Dinamis Bidang Kearsipan				
		Jumlah instansi pusat dan daerah yang mendapatkan supervisi kearsipan	8 Pusat 8 Daerah	8 Pusat 8 Daerah	100%	
		Penyusutan Jadwal Retensi Arsip	25 JRA	25 JRA	100%	
		Penyelenggaraan Arsip Masuk Desa	22 Kabupaten/ Kelurahan	22 Kabupaten/ Kelurahan	100%	
		Pengembangan Pegawai	100 Pegawai	117 Pegawai	117%	
3.	Mewujudkan usaha penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen negara	Jumlah rekomendasi penilaian yang ditindaklanjuti pengakuisisian dan pemusnahan arsip	25 Instansi	25 Instansi	100%	
		Jumlah daerah bencana arsip yang diselamatkan	6 Daerah	6 Daerah		
		Jumlah daftar arsip pengolahan arsip konvensional	13 Daftar/ Inventaris	22 Daftar/ Inventaris	169%	
		Jumlah Arsip Rusak yang direstorasi	3.300 Lembar	3.300 Lembar	100%	
		Jumlah Penerbitan Naskah Sumber Arsip yang terbitkan	9 Naskah	9 Naskah	100%	

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2010**

PROGRAM	KEGIATAN						KET	
	Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	Presentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK	<i>Input:</i>	SDM Dana	Orang Rp	Orang Rp 1.514.372.000,-	Rp. 1.398.250.880	92,33	
		<i>Output:</i>	Jumlah Laporan Pengkajian dan Pengembangan Kearsipan Dinamis dan statis	Laporan	8 Laporan Hasil Kajian	8 Laporan Hasil Kajian	100	
		<i>Outcomes:</i>	Jumlah Pengkajian dan pengembangan kearsipan, baik konvensional maupun elektronik yang dapat dijadikan acuan penyusunan NSPK kearsipan dinamis dan statis	%	80 %	62,5%	100	
	Jumlah Basis Data Penyelenggaraan JIKN	<i>Input:</i>	SDM Dana	Orang Rp	Rp. 181.874.000,-	Rp 178.295.950	98,03	
		<i>Output:</i>	Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah yang dibina dalam Implementasi JIKN	LKD	33 LKD	33 LKD		
		<i>Outcomes:</i>	Persentase Lembaga Kearsipan Daerah dan Lembaga Kearsipan lainnya yang telah dibina sebagai anggota jaringan	%	80 %			

PROGRAM	KEGIATAN						KET
	Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi yang sudah menerapkan SIKS-TIK	<i>Input:</i>	SDM Dana	Orang Rp	Rp. 905.400.000,-	Rp. 857.158.400	96,65
		<i>Output:</i>	Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah yang dibina	LKD	12 LKD	12 LKD	
		<i>Outcomes:</i>	Persentase Lembaga Kearsipan Daerah dan Lembaga Kearsipan lainnya yang telah dibina sebagai anggota jaringan	%	80 %		
	Jumlah instansi pusat yang sudah menerapkan SIKD-TIK	<i>Input:</i>	SDM Dana	Orang Rp	Rp. 750.000.000	Rp. 722.347.950	96,31
		<i>Output:</i>	Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah yang dibina dalam Implementasi Aplikasi Pengelolaan Arsip Dinamis Berbasis TI	LKD	10 LKD	10 LKD	
		<i>Outcomes:</i>	Persentase Lembaga Kearsipan Daerah dan Lembaga Kearsipan lainnya yang telah dibina sebagai anggota jaringan	%	80 %	86,67%	108
Mewujudkan usaha-usaha pembinaan kearsipan secara nasional di lingkungan lembaga aparatur negara	Jumlah lembaga/unit kearsipan dan arsiparis yang terakreditasi dan disertifikasi	<i>Input:</i>	SDM Dana	Orang Rp	Rp. 195.000.000	Rp. 185.258.400	95,00
		<i>Output:</i>	Jumlah Lembaga dan Unit Kearsipan serta arsiparis yang terakreditasi dan tersertifikasi	Lembaga/Orang	7 lembaga 40 orang	7 Lembaga 40 orang	100
		<i>Outcomes:</i>	Persentase Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah yang telah menyelenggarakan kearsipan dinamis sesuai dengan NSPK Bidang Kearsipan	%	80 %	71,79%	89,74

PROGRAM	KEGIATAN						KET	
	Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis	<i>Input:</i>	SDM Dana	Orang Rp	Rp. 49.516.000	Rp. 46.551.650	94,01	
		<i>Output:</i>	Jumlah pedoman kearsipan statis yang disusun	Pedoman	1 Pedoman	1 Draft Pedoman		
		<i>Outcomes:</i>	Jumlah standar, pedoman/prosedur, kriteria kearsipan dinamis dan statis, baik konvensional maupun elektronik yang dapat diimplementasi	Pedoman	1 pedoman			
	Jumlah peserta bimbingan arsiparis dan tim penilai	<i>Input:</i>	SDM Dana	Orang Rp	Rp.1.138.646.000	Rp.1.100.070.250	96,61	
		<i>Output:</i>	Jumlah Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah yang dibina	Lembaga, Pemerintah Daerah	4 Pusat 5 Daerah	4 Pusat 5 Daerah	100	
		<i>Outcomes:</i>	Persentase Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah yang telah menyelenggarakan kearsipan dinamis sesuai dengan NSPK Bidang Kearsipan	%	80 %		100	
	Jumlah provinsi yang mendapatkan kendaraan layanan masyarakat sadar arsip	<i>Input:</i>	SDM Dana	Orang Rp	Rp.1.332.600.000	Rp. 1.319.576.562	99,02	
		<i>Output:</i>	Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah yang mendapat Mobil Layanan Sadar Arsip	Provinsi Kabupaten/ Kota	14 Provinsi 2 Kabupaten/Kota	14 Provinsi 2 Kabupaten/Kota	100	
		<i>Outcomes:</i>	Persentase Lembaga Kearsipan Daerah yang mendapat Mobil Layanan Sadar Arsip	%	80 %		100	

PROGRAM	KEGIATAN						KET
	Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah instansi pusat dan daerah yang mendapatkan bimbingan dan konsultasi kearsipan	<i>Input:</i>	SDM Dana	Orang Rp	Rp.497.760.000	Rp. 489.937.925	98,43
		<i>Output:</i>	Jumlah Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah yang dibina	Lembaga, Pemerintah Daerah	11 Pusat 18 Daerah	11 Pusat 18 Daerah	100
		<i>Outcomes:</i>	Persentase Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah yang telah menyelenggarakan kearsipan dinamis sesuai dengan NSPK Bidang Kearsipan	%	80 %		
	Jumlah instansi pusat dan daerah yang mendapatkan supervisi kearsipan	<i>Input:</i>	SDM Dana	Orang Rp	Rp.372.080.000	Rp.356.169.700	95,72
		<i>Output:</i>	Jumlah instansi yang mendapat supervisi kearsipan	Instansi	8 Pusat 8 Daerah	8 Pusat 8 Daerah	100
		<i>Outcomes:</i>	Presentase instansi yang mendapat supervisi kearsipan				
	Jumlah instansi yang mendapat persetujuan Jadwal Retensi Arsip	<i>Input:</i>	SDM Dana	Orang Rp	Rp.109.455.000	97.290.000	88,88
		<i>Output:</i>	Jumlah Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah yang memperoleh Persetujuan JRA	Pusat dan Daerah	25 Pusat dan Daerah	11 Pusat dan Daerah	
		<i>Outcomes:</i>	Persentase Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Yang melaksanakan Penyusutan Arsip sesuai JRA	%	80%	86,67%	
	Jumlah Penyelenggaraan Arsip Masuk Desa	<i>Input:</i>	SDM Dana	Orang Rp	Rp.905.400.000	Rp.875.158.400	96,65
		<i>Output:</i>	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Arsip MAsuk Desa	Kab/Kota	22 Kabupaten/Kota		100

PROGRAM	KEGIATAN						KET
	Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<i>Outcomes:</i>	Presentase jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Arsip Masuk Desa				
	Pengembangan Pegawai	<i>Input:</i>	SDM Dana	Orang Rp	Rp.1.530.000.000	RP.1.349.555.000	98,21
		<i>Output:</i>	Jumlah pegawai yang mendapat bantuan beasiswa	Kab/Kota	100 pegawai	117 Pegawai	117
		<i>Outcomes:</i>	Presentase untuk meningkatkan dan pengembangan pegawai yang berkompeten				
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	Jumlah rekomendasi penilaian yang ditindaklanjuti pengakuisisian dan pemusnahan arsip	<i>Input:</i>	SDM Dana	Orang Rp	Rp.349.309.000	Rp.348.714.000	99,83
		<i>Output:</i>	Jumlah Arsip yang diselamatkan	Instansi	25 instansi	25 instansi	100
		<i>Outcomes:</i>	Jumlah instansi pusat yang menyerahkan arsip statis ke ANRI	instansi	25 instansi	25 instansi	100
	Jumlah daerah bencana arsip yang diselamatkan	<i>Input:</i>	SDM Dana	Orang Rp	Rp. 500.400.000	Rp.499.068.700	99,73
		<i>Output:</i>	Jumlah Daerah yang arsipnya dapat diselamatkan akibat bencana	Daerah	6 Daerah	6 Daerah	100
		<i>Outcomes:</i>	Presentase penyelamatan arsip yang diselamatkan	Daerah	6 Daerah	6 Daerah	100
	Jumlah daftar arsip pengolahan arsip konvensional	<i>Input :</i>	SDM Dana	Orang Rp	Rp.828.263.000	Rp.827.503.850	99,91
		<i>Output:</i>	Jumlah daftar/inventaris	Daftar	13 Daftar	22 Daftar	100
		<i>Outcomes:</i>	Jumlah daftar arsip arsip yang di olah	Daftar	13 Daftar	22 Daftar	100

PROGRAM	KEGIATAN						KET	
	Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Jumlah Arsip Rusak yang direstorasi	<i>Input :</i>	SDM Dana	Orang Rp	Rp.1.159.451.000	RP.1.158.831.100	99,01	
		<i>Output:</i>	Jumlah Arsip yang di restorasi	Instansi	3.300 lembar	15 Instansi	100	
		<i>Outcomes:</i>	Jumlah Arsip Statis yang dipreservasi dan dialihmediakan					
	Jumlah Penerbitan Naskah Sumber Arsip yang terbitkan	<i>Input :</i>	SDM Dana	Orang Rp	Rp.1.579.499.000	RP.1.526.117.550	96,62	
		<i>Output:</i>	Jumlah Naskah Sumber Arsip Yang disusun.	Naskah	9 Naskah	9 Naskah	100	
		<i>Outcomes:</i>	Jumlah Penerbitan dan penyerahan citra daerah Kabupaten/Kota	Naskah Pameran	9 Naskah	9 Naskah	100	

LAMPIRAN 3

**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010**

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		INDEKS EFISIENSI	STANDAR EFISIENSI	KATEGORI	TINGKAT EFISIENSI
		INPUT	OUTPUT				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4 : 3)	(6)	(7)	(8) = (5)-(6):(6)
Mewujudkan pengelolaan arsip yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) di lingkungan lembaga aparatur negara	1 Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK	92.33	100	1.08	1.00	EFISIEN	0.08
	2 Jumlah Basis Data Penyelenggaraan JIKN	98.03	100	1.02	1.00	EFISIEN	0.02
	3 Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi yang sudah menerapkan SIKS-TIK	86.65	100	1.15	1.00	EFISIEN	0.15
	4 Jumlah instansi pusat yang sudah menerapkan SIKD-TIK	96.31	100	1.04	1.00	EFISIEN	0.04
Mewujudkan usaha-usaha pembinaan kearsipan secara nasional di lingkungan lembaga aparatur negara	5 Jumlah lembaga/unit kearsipan dan arsiparis yang terakreditasi dan disertifikasi	95.00	100	1.05	1.00	EFISIEN	0.05
	6 Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis	94.01	100	1.06	1.00	EFISIEN	0.06
	7 Jumlah peserta bimbingan arsiparis dan tim penilai	96.61	100	1.04	1.00	EFISIEN	0.04
	8 Jumlah provinsi yang mendapatkan kendaraan layanan masyarakat sadar arsip	99.02	100	1.01	1.00	EFISIEN	0.01

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		INDEKS EFISIENSI	STANDAR EFISIENSI	KATEGORI	TINGKAT EFISIENSI
		INPUT	OUTPUT				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4 : 3)	(6)	(7)	(8) = ((5)-(6)):(6)
	9 Jumlah Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan Kearsipan sesuai dengan NSPK Dinamis Bidang Kearsipan	98.43	100	1.02	1.00	EFISIEN	0.02
	10 Jumlah instansi pusat dan daerah yang mendapatkan supervisi kearsipan	95.72	100	1.04	1.00	EFISIEN	0.04
	11 Penyusutan Jadwal Retensi Arsip	88.88	100	1.13	1.00	EFISIEN	0.13
	12 Penyelenggaraan Arsip Masuk Desa	96.65	100	1.03	1.00	EFISIEN	0.03
	13 Pengembangan Pegawai	98.21	117	1.19	1.00	EFISIEN	0.19
Mewujudkan usaha penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen negara	14 Jumlah rekomendasi penilaian yang ditindaklanjuti pengakuisisian dan pemusnahan arsip	99.83	100	1.00	1.00	EFISIEN	0.00
	15 Jumlah daerah bencana arsip yang diselamatkan	99.73	100	1.00	1.00	EFISIEN	0.00
	16 Jumlah daftar arsip pengolahan arsip konvensional	99.91	169	1.69	1.00	EFISIEN	0.69
	17 Jumlah Arsip Rusak yang direstorasi	99.01	100	1.01	1.00	EFISIEN	0.01
	18 Jumlah Penerbitan Naskah Sumber Arsip yang terbitkan	96.61	100	1.04	1.00	EFISIEN	0.04

PENGGUNA INFORMASI ARSIP STATIS MELALUI PENGELOLAAN ISI PORTAL JIKN

NO.	BULAN	INFORMASI ARSIP STATIS	
1	Januari	1	Berita tentang salah satu Keraton di Aceh yang berhasil diduduki oleh Pasukan Belanda, 24 Januari 1874. Sumber: ANRI, Ag. 112 AZ.
		2	Upacara penyerahan bekas tawanan perang Jepang yang diangkut dengan KA dari daerah Republik di perbatasan Bekasi kepada Belanda oleh TRI, 26 Januari 1947. Sumber: ANRI, IPHOS, Album 28-5.1.
		3	Perayaan tahun baru bertempat di Istana Yogya, 1 Januari 1948. Sumber: ANRI, IPHOS, Album 4 Nomor 1.1.
		4	Parade Angkatan Perang RI, 18 Januari 1948. Sumber: ANRI, IPHOS, Album 4 Nomor 10.1.
		5	Anggota Delegasi Indonesia dalam perundingan dengan pihak Komisi Tiga Negara, tampak: Latuharhary Leimena, Ali Sastroamidjojo, Djuanda, Mohammad Roem, Ali Budiardjo dan Mr. Supomo. Kaliurang, 13 Januari 1948. Sumber: ANRI, AV. 910620.AO.
		6	<i>Cease Fire</i> pertemuan antara Komandan TNI di Banten dan Komandan Belanda di Bogor bertempat di demargasi Leuwiliang-Jasinga, 24 Januari 1948. Sumber: ANRI, IPHOS, Album 4 Nomor 15.2.
		7	Keputusan Markas Angkatan Perang Sabil Yogyakarta tentang penunjukkan Sri Paduka Hamengku Buwono untuk memimpin Kementerian Pertahanan, 25 Januari 1948. Sumber: ANRI, Djogdja Documenten Nomor 244.
		8	Konperensi untuk merundingkan soal Indonesia di New Delhi, India, 20-23 Januari 1949, tampak Wakil Birma sedang menyampaikan usul supaya dibentuk tentara sukarela untuk membantu bangsa Indonesia melawan agresi Belanda. Sumber: ANRI, KR. 530520. FG.1-7.
		9	Upacara pemakaman jenazah almarhum Panglima Besar Sudirman, 30 Januari 1950. Sumber: ANRI, IPHOS, Album 4 Nomor 4.1

NO.	BULAN	INFORMASI ARSIP STATIS	
		10	Peletakan batu pertama Universitas Negeri Gadjah Mada oleh Presiden Soekarno di Yogyakarta, 10 Januari 1952. Sumber: ANRI, Kempen 40
		11	Pidato Presiden Soekarno pada upacara peletakan batu pertama Proyek Reaktor Atom di Serpong, Tangerang, 16 Januari 1965, Sumber: ANRI, Pidato Presiden Nomor 694.
2	Februari	1	Upacara Pelantikan pucuk pimpinan TNI oleh Presiden Soekarno di Istana Jogjakarta (15 Februari 1947) Sumber: ANRI, Album 28–8 Nomor 2.
		2	Sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) II, diselenggarakan di Malang, 25 Februari – 5 Maret 1947. Tampak: Presiden Soekarno memberikan sambutan pada pembukaan sidang, 25 Februari 1947, Wakil Presiden Mohammad Hatta duduk disebelah kanan. Sumber: ANRI, 950207 AV 2.
		3	Resolusi rakyat Madura tentang dukungan terhadap pemerintah dan tidak menolak terpisahnya Madura dari RI, 19 Februari 1948. Sumber: ANRI, Delegasi Indonesia, Nomor 373.
		4	Dengan mendapat sambutan yang meriah dari rakyat Presiden Soekarno untuk pertama kalinya tiba di Surabaya dan meninjau ALRI (Februari 1950). Sumber: ANRI, IPHOS, Album 4 Nomor 9.1.
		5	Para anggota parlemen RIS sedang memasuki ruang sidang untuk mengikuti upacara pembukaan Sidang Parlemen RIS di Gedung Parlemen RIS RIS, Jakarta. Sumber: ANRI, 500215 FG 2–14
		6	Dalam kunjungan ke Sulawesi Selatan (Makasar), tampak Presiden Sukarno menikmati suasana pedesaan di Pare Pare, 5 Februari 1953. Sumber: ANRI, K530205 RR 33.
		7	Surat dari Radja Al alam Ugar Sekar kepada Presiden RI menyatakan bahwa rakyat Irian Barat ingin masuk wilayah RI, Februari 1954. Sumber: ANRI, Kabinet Presiden, Nomor 1719–2.
		8	Protes rakyat Aceh bahwa nama pesawat Dakoda Seulawah 1, Seulawah 2 dan Gasida yang merupakan sumbangan rakyat Aceh kepada pemerintah RI diganti dengan Gunung Mas, 16 Februari 1961. Sumber: ANRI, Ruslan Abdul Gani, Nomor 1041–1.

NO.	BULAN	INFORMASI ARSIP STATIS	
3	Maret	1	Bandung menjadi Lautan Api akibat serangan udara Inggris, 23 Maret 1945. Sumber: ANRI, Album 36-9.2.
		2	Perdana Menteri Sutan Syahrir sedang bercakap-cakap dengan Radjiman Wedyodiningrat, dalam sidang KNIP di Malang, 25 Februari – 6 Maret 1947. Insert: Ketua KNIP Mr. Asaat sedang bercakap-cakap dengan Mangunsarkoro dan Manai Sophiaan yang keduanya adalah golongan oposisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 6. Sumber: ANRI, 950207 AV 1.
		3	Upacara peringatan 1 tahun berdirinya AURI di Lapangan Maguwo Yogyakarta, 20 Maret 1947. Sumber: ANRI, Album 28-20.2.
		4	Pekik merdeka 2,5 tahun RI di Istana Yogyakarta, 1 Maret 1948. Sumber: ANRI, Album 11-1.1.
		5	Demonstrasi rakyat Jawa Barat menentang negara Pasundan, 16 Maret 1948. Sumber: ANRI, Album 11-12.2.
		6	Gedung "CORCODIE" yang hampir selesai untuk dipakai Konferensi Asia Afrika di Bandung, 19 Maret 1955 Sumber: ANRI, Kempen, 550319 FP 2L.
		7	Pidato PJM Presiden Sukarno pada peresmian Institut Teknologi di Bandung, 2 Maret 1959. Sumber: ANRI, Pidato Presiden Nomor 64.
		8	Kompleks Asean Games 1962 – Jembatan Daun Semanggi-Hotel Indonesia. Jakarta 15 Maret 1962 Sumber: ANRI, Kempen, 620315 FG 7.
		9	Pidato PJM Presiden Sukarno pada upacara perletakan batu pertama gedung rumah sakit di Rawamangun Jakarta, 21 Maret 1962. Sumber: ANRI, Pidato Presiden Nomor 378.
4	April	1	Laporan H.W. de Kock mengenai penangkapan Pangeran Diponegoro di Magelang, 1 April 1830. Sumber: ANRI, Djokja No. 10-5
		2	Statistik hasil perkebunan pohon kopi, pohon kelapa, luas ladang dan sawah di wilayah Amurang, 15 April 1865. Sumber: ANRI, Menado No. 12.
		3	Surat Perintah Presiden RI kepada Kepala Kepolisian Negara dan Mayor Jenderal Santoso, Panglima Polisi Tentara tentang penjagaan Kaliurang dan sekitarnya selama perundingan Indonesia-Belanda, 12 April 1948. Sumber: ANRI, Delegasi Indonesia No. 310.
		4	Notulen Rapat Delegasi Indonesia dengan Kabinet di Istana Presiden Yogyakarta, 26 April 1948. Sumber ANRI: Delegasi Indonesia No. 904.

NO.	BULAN	INFORMASI ARSIP STATIS	
		5	Rumah Sakit Umum di Tulahu, Maluku tanggal 30 April 1954. Sumber: ANRI, Kempen RI No. 540430 WW 5-1.
		6	Keadaan di Pasar Palu yang telah dibebaskan dari Peremesta, jual beli berjalan lancar, 12 April 1958 Sumber: ANRI, Kempen 580412 SS 3
		7	Rapat umum mendukung rencana Dekrit Kembali ke UUD'45 di Yogyakarta, 19 April 1959. Sumber: ANRI, Kempen 19 April 1959
		8	Tembakan Salvo pada saat upacara pemakaman jenazah Dr. Ki Hajar Dewantara, 29 April 1959. Sumber: ANRI, Kempen 590429 GM 27.
		9	Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, 19 April 1963. Sumber: ANRI, Kempen 63-3992.
5	Mei	1	Pangeran Notokusumo sedang berpidato pada suatu konperensi wartawan di Capel Court, Collins Street, Melbourne, 14 Mei 1945. Sumber: ANRI, A12161.
		2	Masjid Agung di Karang Antu, Banten Lama, 8 Mei 1951. Sumber: ANRI, Kempen 513182.
		3	Kebun Raya Bogor di Istana Bogor, 27 Mei 1951. Sumber: ANRI, Kempen 7261.
		4	Tamu negara Presiden Soviet Uni K.E Worosjilov dan rombongan bersama Presiden Sukarno bertolak dari Airport Kemayoran ke Medan, 16 Mei 1957 Sumber: ANRI, Kempen 570516 AA7.
		5	Amanat Presiden Republik Indonesia pada upacara pembukaan waduk Tjatjaban (Tegal), 19 Mei 1959. Sumber: ANRI, Pidato Presiden Nomor 78.
		6	Pembangunan Hotel Indonesia, Jakarta 16 Mei 1960. Sumber: ANRI, 600516.
		7	Pidato Presiden Soekarno pada Rapat Raksasa di Lapangan Merdeka, Ambon untuk menyambut masuknya Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan RI, 1 Mei 1963. Sumber: ANRI, Pidato Presiden Nomor 487.
		8	Pemandangan Lapangan Terbang Sentani Kotabaru, Mei 1963. Sumber: ANRI, 63-6441.
6	Juni	1	Keputusan hasil Kongres Pemuda Indonesia ke II di Yogyakarta, tanggal 8-9 Juni 1946. Sumber: ANRI, Djokjadokumenten No. 51.

NO.	BULAN	INFORMASI ARSIP STATIS	
		2	Polisi RI Masuk Jogja kembali pada tanggal 30 Juni 1949. Sumber: ANRI, Album 21-2.1.
		3	Kapal terbang yang membawa rombongan Presiden Republik Indonesia Serikat terbang di atas lautan Jawa, Madura, 13 Juni 1950. Sumber: ANRI, 500613 JJ 10 (JT 5001-128)
		4	Mereka sanggup berkoperasi, mereka sudah mempunyai lumbung, timbunan padi, timbunan kedelai, dan dua buah sepeda serta balai desa yang didirikan karena keuntungannya. Pasuruan, Juni 1951. Sumber: ANRI, Kempen 4(JT 5101-315).
		5	Calon haji 1952 di Payakumbuh, 16 juni 1952. Sumber: ANRI, Kempen 520612.
		6	Pidato Presiden Soekarno tanggal 28 Juni 1960 pada Musyawarah Dinas Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan para gubernur. Sumber: ANRI, Pidato Presiden Nomor 190.
		7	Pembangunan jalan raya Jakarta by Pass, 23 Juni 1963. Sumber: ANRI, Kempen Nomor 638177.
		8	Surat dari Penguasa Pelaksanaan DWIKORA Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua DPR-GR tanggal 8 Juni 1966 mengenai tuntutan masyarakat terhadap rencana pembentukan Daerah Otonom Tk. II (Kabupaten) Atjeh Tenggara. Sumber: ANRI, SEKKAB Nomor 368.
		9	Pemberian gelar kehormatan akademis Doktor Honoris Causa dari Yayasan Universitas Proklamasi (45) kepada dua orang tokoh Islam Mr. Moh. Natsir dan Mr. Moh. Roem, 16 Juni 1980. Sumber: ANRI, Setwapres Adam Malik Nomor 652.
7	Juli	1	Batu tulis di Bogor, Peninggalan dari Kian Santang 22 Juli 1853. Sumber: ANRI, 512127 JB 5302-287.
		2	Surat Keputusan tanggal 18 Juli 1911 No. 8 mengenai pembangunan persiapan bagian dari sekolah guru untuk guru sekolah dasar pribumi di Ungaran, afdeling Salatiga, Karesidenan Semarang, 1911. Sumber: ANRI, Algemene Secretary Besluit 18 Juli 1911 No. 8-1.
		3	Gubernur Jend. Dr. H. J. van Mook sedang menyampaikan pidato pada Pembukaan Konferensi Malino. Makasar, Juli 1946. Sumber: ANRI, NIGIS 26353.

NO.	BULAN	INFORMASI ARSIP STATIS	
		4	<p>Penetapan Pemerintah RI Jogjakarta No. 16 tanggal 15 Juli 1946 tentang perubahan sementara bentuk dan susunan Pemerintah di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta dan penghapusan Jabatan Komisaris Tinggi untuk Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta. Sumber: ANRI, SETNEG 539.</p>
		5	<p>Pertemuan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan UNCI di Jogja, 5 Juli 1949. Sumber: ANRI, Album 21-11.1.</p>
		6	<p>Panglima Besar Sudirman sebelum menuju Yogyakarta bercakap-cakap dengan Letkol Soeharto dan para perwira lainnya, 8 juli 1949. Sumber: ANRI, Album 20.6.2.</p>
		7	<p>Panglima Besar Sudirman dengan pengawalan yang kuat menuju ke Yogyakarta, 9 Juli 1949. Sumber: ANRI, Album 20.9.1</p>
		8	<p>Rombongan Presiden Filipina Elpidio Quirino saat berkunjung ke museum di Denpasar Bali. 23 Juli 1952. Sumber: ANRI, Kempen 520722 MM 8.</p>
		9	<p>Presiden Soekarno dan Wapres Moh. Hatta tiba kembali di Jogja dari Bangka, 6 Juli 1959. Sumber: ANRI, Album 21-13.1.</p>
		10	<p>Petisi Dewan Harian Yayasan Universitas Proklamasi (45) mengenai status Daerah Istimewa Yogyakarta, 17 juli 1979. Sumber: ANRI, SETWAPRES ADAM MALIK 205.</p>
8	Agustus	1	<p>Surat dari Direktur Keuangan kepada Dewan Gereja Kongregasi Evangelis-Lutherian, 15 Agustus 1838 Nomor 8, memberitahukan bahwa untuk merampungkan pembangunan Willemskerk (sekarang Gereja Immanuel, Jalan Merdeka Timur) masih diperlukan dana sebesar 25,395 gulden. Sumber: ANRI, Batavia No. 340-1.</p>
		2	<p>Keputusan menyetujui pembangunan waduk penampungan yang permanen dengan kayu penyanggah di atasnya pada saluran Krukut lebih kurang 50 meter di bawah pintu air Karet, di afdeling Meester Cornelis (sekarang Jatinegara) dengan biaya 6930 Gulden. Sumber: ANRI, Besluit 9 Agustus 1901 Nomor 22.</p>
		3	<p>Nota Keterangan tanggal 25 Agustus 1937 mengenai pemancangan stasiun jaringan telegraf di pantai Teluk Jakarta, dekat kampung Bandan, disertai dengan peta berskala 1:20.000. Sumber: ANRI, BOW KODE BL 150.</p>
		4	<p>Upacara pembukaan hubungan Radio-Telepon antara Jawa Sumatera oleh Presiden Sukarno dan Jenderal Sudirman, 17 Agustus 1946.</p>

NO.	BULAN	INFORMASI ARSIP STATIS	
			Sumber: ANRI, Album 33-6.1.
		5	Menteri van Maarseveen, Delegasi dari Belanda ketika berpidato di Konferensi Meja Bundar. 23 Agustus 1949 Sumber: ANRI, RVD N 8 (4501-159).
		6	Upacara pengambilan sumpah anggota-anggota Parlemen Negara Kesatuan Republik Indonesia di Istana Negara. 16 Agustus 1950. Sumber: ANRI, Album 13.8.
		7	Gedung Studio RRI di Bukit Tinggi, 31 Agustus 1950. Sumber: ANRI, Kempen 50600.
		8	Kunjungan tamu negara Ny. Soong Ching Ling di Bandung. Jamuan dan pertunjukan Kesenian diberikan oleh Gubernur Jawa Barat di Gubernuran Bandung. 18 Agustus 1956. Sumber: ANRI, Kempen 580818 FP 8.
		9	Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan-peraturan Pemerintah No.44, 45, 46, 65 Tahun 1951, No.45, 51 Tahun 1952, No.18 Tahun 1953 dan No.12 Tahun 1954 mengenai perubahan "Provinsi Sumatra Tengah" atau "Provinsi" menjadi: "Daerah-daerah Tingkat I Sumatra Barat, Riau dan Jambi", 9 Agustus 1957. Sumber: ANRI, Setkab PP No. 329.
9	September	1	Akte persetujuan tentang batas yang diperbaharui antara Wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, 27 September 1830. Sumber: ANRI, Djogja No. 10-1.
		2	Amanat Seri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Seri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII mengenai Negari Ngajogjokarta Hadiningrat dan Negari Paku Alaman adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia. 28 Puasa Eho 1876 (5 September 1945). Sumber: ANRI, Kementrian Dalam Negeri No. 1.
		3	Konferensi Meja Bundar dari kiri ke kanan: Mr. J.A. Jonkman, Mr. Ali Sastroamidjoyo Duta besar RIS di Amerika dan Kapten "oranye" H.W. Hemmes. Amsterdam 17 September 1949. Sumber: ANRI, RVD N196 (4501-1155).
		4	Pelantikan Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia. Kepala Angkatan perang Kolonel Simatupang berdiri di samping Presiden Soekarno setelah selesai dilantik. Jakarta 17 September 1951. Sumber: ANRI, 514788.
		5	Konferensi WHO di Bandung. Dari Kiri ke kanan: Menteri Kesehatan Dr. J. Leimena., Ny. Dr. J. Leimena dan Gubernur Jawa Sanusi Hardjadinata.5 September 1955.

NO.	BULAN	INFORMASI ARSIP STATIS	
			Sumber: ANRI, Kempen 550905 FP 33 (JB 5502-387).
		6	Kunjungan misi persahabatan Singapura ke Bandung. Ketua Misi PM David Marschall dan Rombongannya bergambar bersama di depan podium Gedung Merdeka. 11 September 1955. Sumber: ANRI, Kempen 550905 FP 33 (JB 5502-387).
		7	Pidato Presiden Soekarno pada pembukaan Perguruan Tinggi Udayana tanggal 29 September 1958 di Bali yang memberikan pujian kepada masyarakat Bali sebagai masyarakat yang sangat toleran dalam suasana persatuan. Sumber: ANRI, Pidato Presiden, 023(55)-1.
		8	Demonstrasi mengganyang Malaysia di kedutaan besar Malaya di Jl. Budi Kemulyaan Jakarta, 16 September 1963. Sumber: ANRI, 63-11544 (399 FG 63).
10	Oktober	1	Laporan dari Susuhunan Pakubuwono kepada Residen Gomes tentang kekalahan prajurit kompeni di daerah pesisir Jawa, 4 Oktober 1799. (Dalam Bahasa Jawa Kuno) Sumber: ANRI, Hoge Regering 3619.
		2	Upacara peringatan Hari Angkatan Perang RI yang pertama dan penyerahan panji-panji divisi di alun-alun Jogjakarta, 5 Oktober 1946. Sumber ANRI, Album 33-18.1.
		3	Pidato radio dalam bahasa Bali yang dibawakan oleh K. Mukarana mengenai seruan agar rakyat Bali membela kemerdekaan Indonesia, Oktober 1947. Sumber: ANRI, Kempen No. 114.
		4	Divisi Siliwangi mengadakan pembersihan di sekitar Madiun dan Daerah Gunung Kidul terhadap pemberontakan PKI/Madiun, 1 Oktober 1948. Sumber: ANRI, Album 7-2.1.
		5	Petani-petani Bangsa Tionghoa di Singkawang 9 oktober 1951 Sumber: ANRI, Kempen 511009 KK9.
		6	Kampung Singkawang Kalimantan Barat, 9 Oktober 1051 Sumber: ANRI, Kempen 511009 KK26.
		7	Pidato Presiden Soekarno pada pawai adat menyambut kedatangan Presiden Mexico Senior Don Adolfo Lopez Mateos di Bali tanggal 18 Oktober 1962 membicarakan persahabatan antara RI dengan Mexico. Sumber: ANRI, Pidato Presiden 425 (20)-1.

NO.	BULAN	INFORMASI ARSIP STATIS	
11	November	1	Pengumuman tentang pengembalian daerah Lampung menjadi propinsi tersendiri setelah pada tahun 1752 dipinjamkan kepada Sultan Banten, November 1808. Sumber: ANRI, PLAKAAT BOEK JILID XV.
		2	Dua jalur kereta api di Stasiun Kroya, jalur kereta api Batavia-Surabaya, Cilacap, Jawa Tengah, 1 November 1929. Sumber: ANRI, KIT. 703-74.
		3	Peta Rencana Kota Surakarta Jawa Tengah, Edisi I, November 1945. Sumber: ANRI, PETA INDONESIA NO. 130549 XLIC 60.
		4	Jendral Sudirman dan pengawalnya sedang memasuki Gedung Markas Besar Inggris di Gedung Merdeka Bandung, dimana akan diadakan perundingan gendatan senjata. Disamping nampak para prajurit RI turut menjaga keamanan, 2 November 1946. Sumber: ANRI, Album 29-12.2.
		5	Notulen dari sidang terakhir KMB (Konferensi Meja Bundar) di Ridderzaal. Den Haaq, 2 November 1949. Sumber: ANRI, Delegasi Indonesia, Nomor 1217.
		6	Tentara pelajar indonesia masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, Jakarta, 14 November 1961. Sumber: ANRI, R 611114 FG 2-2.
		7	Jendral Sudirman dan pengawalnya sedang memasuki Gedung Markas Besar Inggris di Gedung Merdeka Bandung, dimana akan diadakan perundingan gendatan senjata. Disamping nampak para prajurit RI turut menjaga keamanan, 2 November 1946. Sumber: ANRI, Album 29-12.2.
		8	Rapat raksasa di Bengkulu dalam rangka persiapan Pemilu DPRD, 18 Nopember 1952. Sumber: ANRI, Kempen 521117 DD 63.
		9	Latihan perang di Jogjakarta dalam rangka Hari Pahlawan 10 November 1949. Sumber: ANRI, Album 16-12.1.
12	Desember	1	Upacara pembukaan pabrik gula di Padokan Jogjakarta oleh Sri Sultan HB IX dan Menteri Kemakmuran Mr. Sjarifudin Prawiranegara, Desember 1947. Sumber: ANRI, Album 26-20.2.
		2	Anggota Delegasi Wanita Indonesia berangkat ke India dari Kemayoran untuk menghadiri Women Congres/Kongres Wanita pada tanggal 10 Desember 1947. Sumber: ANRI, Album 25-14.1.

NO.	BULAN	INFORMASI ARSIP STATIS	
		3	Upacara peringatan Hari Ibu di Jogjakarta, 22 Desember 1947. Tampak para wanita membawa spanduk. Sumber: ANRI, Album 25–20.1.
		4	Laporan singkat rapat pembentukan PPN (Pembela Pertahanan Nasional) Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka dan anggaran dasarnya, 30 Desember 1947. Sumber: ANRI, Kempen, 171.
		5	Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan rombongan tiba di Madura disambut hangat oleh rakyat setempat, 23 Desember 1949. Sumber: ANRI, Album 2–6.1.
		6	Dengan diantar oleh PD. Presiden RI Mr. Asaat dan Let.Kol. Soeharto, Presiden Soekarno dan keluarga meninggalkan kota Jogjakarta menuju Jakarta, 29 Desember 1949. Sumber: ANRI, Album 2–13.2.
		7	Memorandum mengenai Acara Konferensi Bogor, 8 Desember 1954. Sumber: ANRI, LN. Palar Nomor 287.
		8	Sekitar Konferensi Panca Negara di Bogor. Para pelajar sedang mendengarkan wejangan dari para PM lima Negara, 29 Desember 1954. Sumber: ANRI, 541229 FJ 1–2.
		9	Kunjungan Presiden Yugoslavia ke Gubernuran Bandung. PJM Pres. J.B. Tito dan PJM Presiden Sukarno tiba di Gubernuran Bandung disambut upacara militer, 25 Desember 1958. Sumber: ANRI, Kempen, 581225 FP 4–5 (JB5805–385)
		10	Keputusan Kepala Pusat Perindustrian tentang penempatan pejabat-pejabat dalam lingkungan Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio (LIPNUR) di Pangkalan Angkatan Udara Utama Husein Sastranegara, Bandung, 28 Desember 1971. Sumber: ANRI, IPTN Nomor 1.